



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya Kecamatan Astanaanyar dapat menyelesaikan Laporan Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung Tahun 2019, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Presiden Nomo 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Penyusunan Laporan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substansi Laporan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019 Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung merupakan sarana pelaporan kinerja tahunan dalam rangka mengimplementasikan sistem akuntabilitas instansi pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Kota Bandung selama tahun 2019.



Selain itu, Laporan Capaian Indikator Kinerja Tahunan Tahun 2019 Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung Tahun 2018 – 2023, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan Clean Governmen dan Good Governnance serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintahan daerah baik dari dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Dalam tahun 2019 Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung menetapkan sebanyak 3 (tiga) indikator Capaian Kinerja Tahunan sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Indikator Capaian Kinerja 1 dengan nilai rata-rata capaian kinerjanya sebesar 102,55%.
- Indikator Capaian Kinerja 2 dengan nilai rata-rata capaian kinerjanya sebesar 100%.
- Indikator Capaian Kinerja 3 dengan nilai rata-rata capaian kinerjanya sebesar 100%.



Hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 (tiga) indikator Capaian Kinerja Tahunan tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 85 – 100 yang berarti rata-rata capaian kerjanya melebihi target yang telah diperjanjikan

Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 31.249.454.159,43 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 28.429.663.243,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 90,98%,

Akhir kata semoga Laporan Capaian Indikator Kinerja Tahunan Tahun 2019 Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2020 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Bandung, Januari 2020

Camat Astanaanyar,

Drs. SYUKUR SABAR

Pembina Tk. I

NIP. 19680904 199006 1 001



DAFTAR ISI



	Perihal	Hal
	Kata Pengantar	1
	Daftar Isi	4
BAB I	PENDAHULUAN	5
	1.1. Latar Belakang	5
	1.2. Gambaran Umum Kecamatan	7
	1.3. Tugas dan Fungsi	17
	1.4. Isu Strategis	38
	1.5. Landasan Hukum	46
	1.6. Sistematika	47
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	49
	2.1. Perencanaan Srategis	49
	2.1.1. Rencana Startegis	49
	1. Visi	51
	2. Misi	51
	3. Tujuan dan Sasaran	52
	4. Indikator Kinerja Utama	53
	5. Perjanjian Kinerja	60
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	62
	3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja	63
	3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama	64
	3.3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	67
	3.4. Akuntabilitas Keuangan	102
	3.5. Prestasi dan Penghargaan	111
BAB IV	PENUTUP	113



BAB I



PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah . Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Astanaanyar selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat



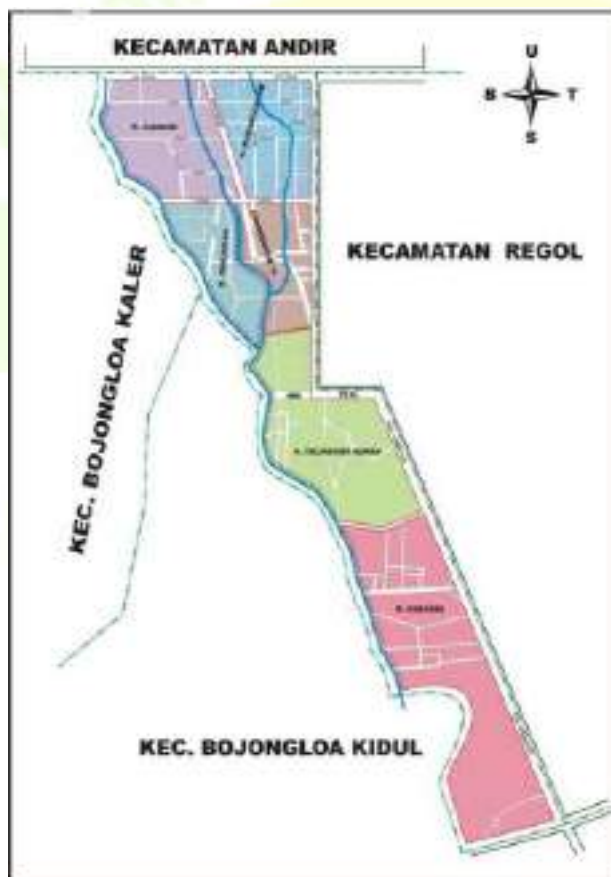
Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Gambaran Umum Kecamatan

Kecamatan Astanaanyar merupakan salah satu dari 30 kecamatan di kota Bandung, yang terletak di pusat kota dengan luas wilayah 287,868 hektar, dengan batas wilayah meliputi:

- Sebelah Utara : Kecamatan Andir
Sebelah Selatan : Kecamatan Bojongloa Kidul
Sebelah Timur : Kecamatan Regol
Sebelah Barat : Kecamatan Bojongloa Kaler



Secara geografis Kecamatan Astanaanyar memiliki bentuk wilayah datar, dengan ketinggian tanah, berada pada ketinggian 700 m di atas permukaan air laut. Suhu maksimum dan minimum di Kecamatan Astanaanyar berkisar 28°C dan 24°C, sedangkan dilihat dari segi curah hujan berkisar 2400 mm/th dan jumlah hari dengan curah hujan yang terbanyak sebesar 10 hari.

Kecamatan Astanaanyar mempunyai 6 kelurahan yang terdiri dari 47 RW serta 304 RT yang sebagian besar wilayah terdiri dari pemukiman dan pertokoan (jasa perdagangan), dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 1.1
JUMLAH DAN LUAS WILAYAH KELURAHAN

NO	KELURAHAN	LUAS WILAYAH (Ha)	JUMLAH RW	JUMLAH RT
1	Cibadak	47,368	9	76
2	Karanganyar	42,5	9	45
3	Nyengseret	38,0	7	47
4	Panjunan	39,0	6	32
5	Pelindung Hewan	65,5	10	59
6	Karacak	55,5	6	45
J U M L A H		287,868	47	304

Sumber : Kecamatan Astanaanyar, Tahun 2019

Kecamatan Astanaanyar yang terletak di tengah kota, dimana tingkat urbanisasi sangat tinggi terbukti dengan jumlah penduduk Kecamatan Astanaanyar pada Tahun 2019 sebanyak 72.955 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 36.135 jiwa dan perempuan sebanyak 36.820 jiwa, dengan jumlah 19.998 KK dan tingkat kepadatan penduduk 253/Ha.

1. Sarana dan Prasarana

Prasarana perhubungan di wilayah Kecamatan Astanaanyar berupa jalan Negara sepanjang 6,6 Km, jalan Propinsi sepanjang 11,3 Km, jalan Kota sepanjang 22 Km, jalan arteri / penghubung sepanjang 22 Km, serta jalan/Gang sepanjang 126 Km.

a. Bidang Pendidikan

Sarana pendidikan yang ada diwilayah Kecamatan Astanaanyar adalah sebagai berikut :

TABEL 1.2
SARANA PENDIDIKAN DI KEC. ASTANAANYAR

Sarana Pendidikan	Jumlah
a. TK	28 Buah
b. SD Negeri	38 Buah
c. SD Swasta	8 Buah
d. SLTP Negeri	1 Buah
e. SLTP Swasta	8 Buah
f. SLTA Negeri	-
g. SLTA Swasta	3 Buah
h. Madrasah Ibtidaiyah	1 Buah
i. Madrasah Tsanawiyah	1 Buah
j. Madrasah Aliyah	1 Buah
k. Perguruan Tinggi Negeri	-
l. Perguruan Tinggi Swasta	-

Sumber : Kecamatan Astanaanyar, Tahun 2019

b. Bidang Kesehatan

Sarana kesehatan yang terdapat di Kecamatan Astanaanyar dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 1.3
SARANA KESEHATAN DI KEC. ASTANAANYAR

Sarana Kesehatan	TAHUN		KETERANGAN
	2017	2018	
Sarana Kesehatan			
• Posyandu	71	71	
• Puskesmas	4	4	
• Balai Kesehatan	11	11	
• Rumah Sakit	2	2	
• Apotek	6	6	
• Dokter / Bidan Praktek	23	23	

Sumber : Kecamatan Astanaanyar, Tahun 2019

c. Bidang Kemakmuran

Dalam mendukung LPE Kota Bandung sebesar 11%, Kecamatan Astanaanyar telah melakukan berbagai upaya baik dengan cara mengembangkan Home Industri maupun Usaha Ekonomi Kecil dan Menengah serta adanya penciptaan lapangan kerja dengan berbagai usaha antara lain :

- a. Pembuatan kerajinan tas dan sepatu Elizabeth
- b. Kerajinan boneka kayu
- c. Pembuatan kompor dan alat dapur lainnya
- d. Makanan dan minuman (Cendol Elizabeth)
- e. Kerajinan cinderamata
- f. Usaha jasa ketok/cat mobil di Kelurahan Karasak
- g. Rintisan usaha percetakan oleh Pemuda Karang Taruna Kelurahan cibadak.

Perkembangan dana bergulir di Kecamatan Astanaanyar melalui program UP2K, MUBR, dan UBK dengan dana semula Rp.33.000.000,- sekarang telah berkembang menjadi Rp.132.000.000,-. Kemudian program P2KP dari awal sebesar Rp.1,3 Miliar sekarang telah mencapai Rp.3,2 Miliar. Program-program diatas adalah sangat mendukung dalam perkembangan dan penguatan Ekonomi Usaha Kecil dan Menengah di wilayah Kecamatan Astanaanyar.

TABEL 1.4

DATA ANGKATAN KERJA, BUKAN ANGKATAN KERJA
 DAN JUMLAH PENGGANGURAN

INDIKATOR	SUB INDIKATOR	KONDISI TAHUN 2018 (JIWA)	KET.
Penduduk Usia Kerja 15-55 tahun	1. Angkatan Kerja	35.963	
	2. Bukan Angkatan Kerja	17.762	
	3. Penduduk yang bekerja	33.450	
	4. Penganggur	1.837	

Sumber : Kecamatan Astanaanyar, Tahun 2019

d. Bidang Lingkungan Hidup

Sarana dan prasana lingkungan hidup yang terdapat di Kecamatan Astanaanyar seperti yang tertera pada tabel di bawah ini:

TABEL 1.5
 SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN HIDUP
 KECAMATAN ASTANAANYAR

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Taman	
	a. Luas Taman	300 m ²
	b. Banyaknya Taman	34 buah
	c. Jalur Hijau	300 m ²
	d. Pohon pelindung/produktif	1710 buah
	e. Sumur resapan	155 buah



Kebersihan	
a. Lokasi TPS	5 Buah
b. Volume Sampah	29 m ³
c. Sarana Angkutan Sampah	51 Buah
d. Personil Kebersihan	107 Orang
e. Sanitasi/Saluran Got	4.500 m

e. Seni Budaya

Kegiatan dan Potensi Seni Budaya yang ada di Kecamatan Astanaanyar antara lain :

- Kelurahan Cibadak : Kacapi Suling, Upacara Adat, Pencak Silat.
- Kelurahan Nyengseret : Pencak Silat paguron Gajah Putih.
- Kelurahan Pelindung Hewan : Calung dan Debus.
- Kelurahan Karasak : Calung, Seni Ibing Pencak Silat, dan Reog.
- Vokal Group.
- Gedung Bersejarah Kediaman Ibu Inggit Garnasih dan Museum Sri Baduga.
- Makam para Bupati yang terletak di Kelurahan Karanganyar

Dalam Bidang Kesenian terdapat beberapa jenis sarana yang mendukung kemajuan Kesenian Kecamatan Astanaanyar yaitu :

- Reog : 3 Buah
- Calung : 2 Buah
- Angklung : 1 Buah
- Kliningan : 3 Buah
- Jaipongan : 4 Buah

TABEL 1.6
POTENSI SENI BUDAYA
KECAMATAN ASTANAANYAR

URAIAN	JUMLAH
a. Paduan Suara	2 Kelompok
b. Orkes Melayu	2 Perkumpulan
c. Kesenian Daerah	8 Perkumpulan
d. Band	2 Perkumpulan
e. Keroncong	1 Perkumpulan
f. Al Barzanzi	6 Perkumpulan
g. Wayang Kulit/Golek/Orang	1 Perkumpulan

f. Bidang Olah Raga

Kegiatan dan Potensi bidang Olah Raga di Kecamatan Astanaanyar antara lain:

1. Gedung Futsal : 5 buah
2. Gedung Bulu Tangkis dan Outdoor : 10 buah
3. Gedung Padepokan Pencak Silat : 2 buah
4. Sasana Tinju : 1 buah
5. Lapangan Basket dan Volley halaman sekolah : 4 buah
6. Bola Volley : 8 buah
7. Tennis Meja : 40 buah
8. Billyard : 3 Buah

g. Keagamaan

Berikut adalah tabel Sarana dan Prasarana Peribadatan di Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung.

TABEL 1.7.
DATA SARANA DAN PRASARANA PERIBADATAN

SARANA PERIBADATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1. Masjid /Majelis Ta'lim	101	Kegiatan Berjalan
2. Gereja	17	Kegiatan Berjalan
3. Kelenteng	3	Kegiatan Berjalan
4. Vihara	7	Kegiatan Berjalan

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan di Kecamatan Astanaanyar dilaksanakan forum Rapat Koordinasi/Minggon setiap hari selasa yang dihadiri oleh para Lurah dan karyawan/i serta Dinas/Instansi Kecamatan Astanaanyar. Kegiatan ini diarahkan untuk :

1. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pemerintah Kelurahan agar dalam penyelenggaraanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yaitu mewujudkan :
 - a. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai suatu proses karena merupakan jalannya proses perubahan yang berlangsung dari cara hidup tradisional masyarakat Pedesaan/Perkotaan menuju masyarakat yang lebih maju dan mantap.
 - b. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai metoda, karena memperhatikan cara pembangunan yang mengusahakan agar masyarakat berkemampuan membangun dirinya sendiri sesuai dengan potensi yang mereka miliki.

- c. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai suatu program, karena dilihat dari semua kegiatan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang ada di setiap Kelurahan dengan terselenggarakannya peningkatan mutu pendidikan yaitu dengan berkoordinasi dengan para Kepala Sekolah yang ada di lingkungan Kecamatan Astanaanyar agar para siswa yang tidak mampu tetapi masih ingin melanjutkan pendidikannya dapat terus bersekolah, meningkatnya daya tampung siswa pendidikan menengah dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Wajib Pendidikan menengah 12 (dua belas tahun Tahun di kalangan masyarakat Kelurahan serta meningkatkan kegiatan pendidikan luar sekolah yang bersifat kemasyarakatan antara lain kepramukaan, latihan keterampilan dan kejar usaha dan sebagainya.
 3. Meningkatnya Sarana dan Prasarana yang berhubungan dengan perekonomian yang meliputi antara lain :
 - a. Perdagangan
Perdagangan sebagai hasil produksi makin berdayaguna sebagai akibat baiknya sarana, prasarana, dan pemasaran hasil produksi baik secara kualitas maupun kuantitas. Disamping itu dengan adanya program-program bantuan Pemerintah dalam hal pengembangan Usaha-Usaha Kecil terutama untuk membantu pendapatan ekonomi keluarga yaitu dengan adanya UPPKS, UBK, UP2K, PPUD, Bawaku Makmur, PNPM, P2KB.
 - b. Koperasi
Kegiatan koperasi sangat membantu dalam perekonomian masyarakat Kelurahan dan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) semakin meningkat disertai dengan peningkatan kegiatan-kegiatan lainnya, seperti adanya

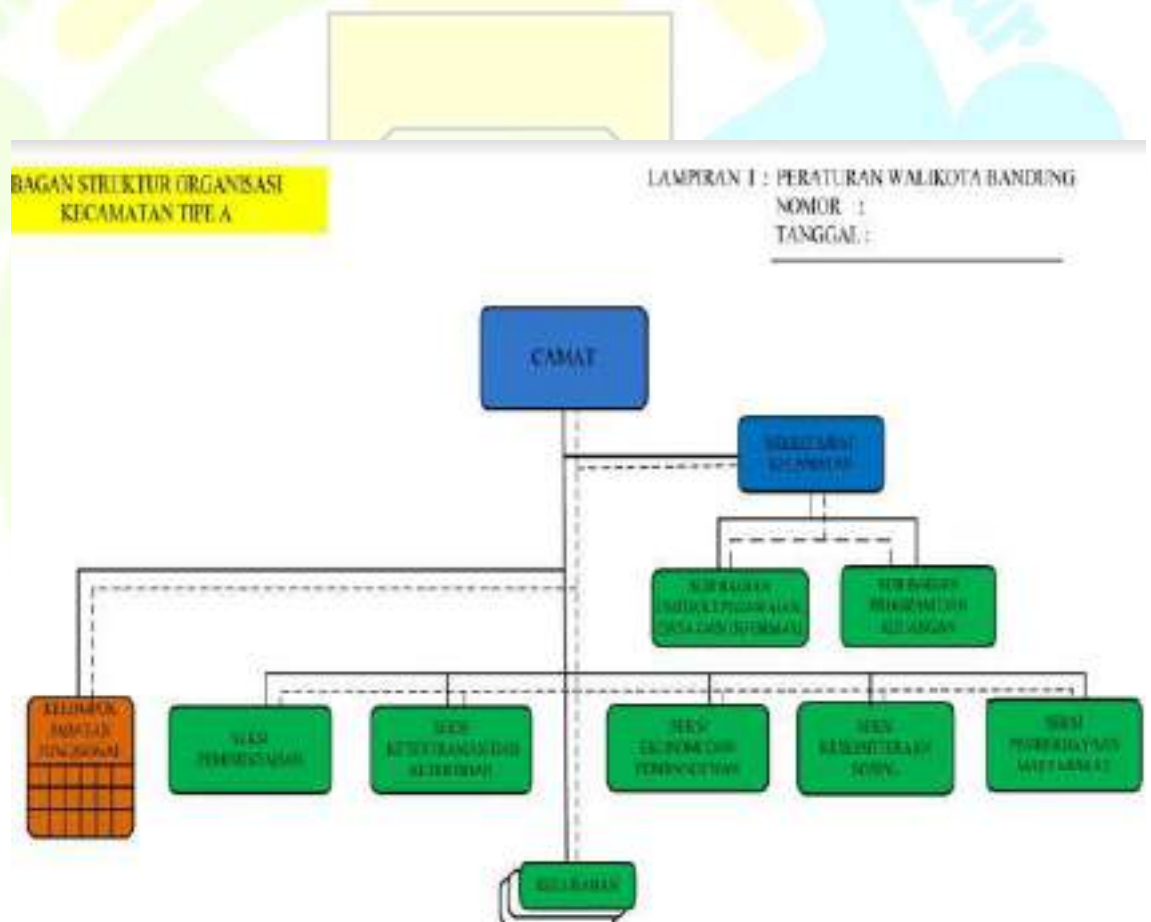
pendidikan dan latihan serta penyegaran kembali bagi pengelola UED-SP, disamping itu adanya disiplin yang baik antara pengelola dengan anggota, sehingga UED-SP semakin bertambah dan modal yang di gulirkan semakin besar serta kegiatan berjalan semakin lancar. Disamping kegiatan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), juga adanya program pemerintah yaitu Modal Usaha Bergulir Remaja (MUBR) yang diperuntukan khusus untuk para remaja yang mempunyai usaha atau keinginan untuk membuka usaha, dimana mereka kekurangan serta membutuhkan modal untuk memajukan serta memulai usahanya. Pada tahun 2013 ini di Kecamatan Astanaanyar telah terbentuk Koperasi baru yaitu Ikhwatama Naratas dari PNPM dengan modal sebesar Rp.40.000.000,- yang bergerak di bidang simpan pinjam dan sosial, dan Warung Umat Bermartabat dari P2KB yang bergerak dalam grosir dan perdagangan umum.

4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih mengefektifkan pembinaan dan pengembangan Lembaga Masyarakat yang bergerak di bidang pembinaan masyarakat dengan pengembangan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
5. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Ketertiban dan Ketentraman di lingkungan penduduk dalam upaya meningkatkan kesadaran Bela Negara masyarakat makin meningkat dengan kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan di sekitar lingkungannya, meningkatnya kualitas dan kuantitas Petugas Keamanan/Limnas sesuai dengan kebutuhan. Disamping itu dengan adanya Siskamling Swakarsa di tingkat RT dan RW, sehingga pelaksanaan Penanganan Ketentraman dan Ketertiban semakin mantap dan kekuatan rakyat terlatih serta terorganisir semakin terciptanya

keamanan dan ketertiban dapat menunjang kelancaran pembangunan di segala aspek.

1.3 Tugas dan Fungsi

Dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan mengacu kepada Peraturan Walikota (perwal) Kota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, maka struktur organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut :



Berdasarkan struktur organisasi tersebut diatas Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat dengan eselon III-A, dengan membawahi:

1. Sekretariat Kecamatan (eselon III-B), membawahi 2 sub bagian dengan eselon IV-B yaitu Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi dan Sub Bagian Program dan Keuangan.
2. 5 (lima) orang kepala seksi dengan eselon IV-A yaitu : Kasi Pemerintahan, Kasi Ketentraman dan Ketertiban, Kasi Ekonomi dan Pembangunan, Kasi Kesejahteraan Sosial dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat.
3. 6 (enam) orang lurah dengan eselon IV-A, yaitu : Lurah Cibadak, Karanganyar, Nyengseret, Panjunan, Pelindung Hewan dan Karasak

Keadaan pegawai pada bulan Desember 2019 di Kecamatan Astanaanyar, adalah sebagai berikut :

NO	SATUAN KERJA	JUMLAH PERSONIL	ESELON				Fungsional Umum	JML
			IVB	IVA	IIIB	IIIA		
1	KECAMATAN	11	2	4	1	1	3	11
2	KEL. CIBADAK	10	4	1	-	-	5	10
3	KEL. KARANGANYAR	6	4	1	-	-	1	6
4	KEL. NYENGSERET	4	2	1	-	-	1	4
5	KEL. PANJUNAN	6	4	1	-	-	1	6
6	KEL. PEL. HEWAN	7	3	1	-	-	2	7
7	KEL. KARASAK	8	4	1	-	-	3	8
	J U M L A H	52	23	10	1	1	16	52

Sumber Kecamatan Astanaanyar 2018

Keadaan pegawai pada bulan Desember 2019 di Kecamatan Astanaanyar berdasarkan Golongan dan Tingkat pendidikan, adalah sebagai berikut :

NO	SATUAN KERJA	GOLONGAN					TINGKAT PENDIDIKAN						
		I	II	III	IV	JML	S D	SM P	SM A	DPL	S1	S2	JML
1	KECAMATAN	-	2	6	3	11	-	1	-	1	8	1	11
2	KEL. CIBADAK	-	1	9	-	10	-	-	3	-	6	1	10
3	KEL. KARANGANYAR	-	1	5	-	6	-	-	2	-	4	-	6
4	KEL. NYENGSERET	-	-	4	-	4	-	-	-	-	3	1	4
5	KEL. PANJUNAN	-	1	5	-	6	-	-	1	-	5	-	6
6	KEL. PEL. HEWAN	-	1	6	-	7	-	1	2	-	4	-	7
7	KEL. KARASAK	1	1	6	-	8	1	-	1	-	5	1	8
	J U M L A H	1	7	41	3	52	1	2	9	1	35	4	52

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Kecamatan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Camat

- (1) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Camat mempunyai fungsi:
 - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;

- e. memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Kecamatan;
- f. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- h. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- i. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat Kecamatan

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang kesekretariatan
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan dan pengoordinasian penyusunan rencana kerja, program kerja, dan anggaran Kecamatan berdasarkan kebijakan operasional Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;



- d. membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup Sekretariat, Sub Bagian dan Seksi;
- e. melakukan pembinaan jasmani dan rohani, mengusulkan pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai lingkup Sekretariat dan Kecamatan;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengoordinasian penyusunan program, data dan informasiserta pengoordinasian tugas-tugas Seksi;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan tugas yang meliputi pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup Sekretariat dan Kecamatan;
- h. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup Sekretariat dan Kecamatan;
- i. melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan kearsipan, protokol dan hubungan masyarakat di lingkungan Sekretariat dan Kecamatan;
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi bahan penetapan rencana kerja daerah lingkup Kecamatan dan Kelurahan yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi bahan penetapan laporan



kinerja daerah lingkup Kecamatan dan Kelurahan yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- l. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Sekretariat dan Kecamatan;
- m. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan Sekretariat dan Kecamatan;
- n. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- o. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional di lingkungan Kecamatan;
- p. mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup kesekretariatan;
- q. mengidentifikasi dan mengumpulkan data dan informasi dari unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- r. mengolah, menata dan menyimpan data dan/atau informasi yang diperoleh dari Sub Bagian dan Seksi;
- s. melaksanakan pelayanan informasi publik;
- t. menyeleksi dan pengujian data dan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik;
- u. melaksanakan kerjasama dengan pejabat pada unit kerja untuk melakukan pengujian guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi;
- v. melakukan koordinasi dengan PPID jika diperlukan dalam penyelesaian sengketa informasi;

- w. melakukan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi;
- x. melaksanakan pengoordinasian perumusan, formulasi dan perencanaan kebijakan lingkup Kecamatan dan Kelurahan;
- y. melaksanakan pengoordinasian implementasi dan evaluasi kebijakan lingkup Kecamatan dan Kelurahan;
- z. melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup Sekretariat dan menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian Kecamatan;
- ã. melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Sekretariat dan Kecamatan;
- ä. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di bidang umum, kepegawaian, data dan informasi;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi mempunyai fungsi:
 - a. menyusun rencana kerja dan program Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi;
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;

- c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
- d. membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
- e. menyiapkan bahan pembinaan jasmani dan rohani, mengumpulkan dan mengolah data bahan usulan pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
- f. melaksanakan administrasi persuratan yang meliputi penerimaan, pencatatan, pendistribusian dan pengiriman naskah dinas;
- g. melaksanakan pengelolaan kegiatan rapat-rapat kedinasan;
- h. melaksanakan pengelolaan kearsipan naskah dinas dan dokumentasi kedinasan;
- i. melaksanakan pengelolaan perpustakaan Kecamatan;
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kehumasan dan keprotokolan;
- k. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kerumahtanggaan, kebersihan, keindahan dan ketertiban lingkungan kantor;
- l. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;



- m. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
- n. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan cuti pegawai;
- o. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, taspen, taperum, asuransi kesehatan pegawai, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga (SKUMPTK);
- p. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi pendidikan dan pelatihan, ijin belajar/tugas belajar, ujian dinas/ujian penyesuaian ijazah;
- q. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi pengembangan karier, pemberian penghargaan dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- r. melaksanakan pengelolaan administrasi presensi kehadiran pegawai, apel pegawai dan hukuman disiplin;
- s. melaksanakan pengelolaan administrasi ijin perceraian pegawai;
- t. menyiapkan administrasi bahan penilaian prestasi kerja pegawai, daftar nominatif untuk kepangkatan (DUK);
- u. melaksanakan dan menyiapkan administrasi rencana kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah lingkup Kecamatan;
- v. menyiapkan administrasi usul penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan barang milik daerah lingkup Kecamatan;



- w. melaksanakan administrasi penatausahaan barang milik daerah lingkup Kecamatan;
- x. melaksanakan pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi yang diperoleh dari unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- y. memfasilitasi SKP dan PPKPNS dari para pegawai se SKPD;
- z. menyiapkan administrasipelayanan informasi publik;
 - â. menyiapkan bahan penyeleksian dan pengujian data dan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik;
 - ä. menyiapkan bahan koordinasi dengan pejabat pada unit kerja untuk melakukan pengujian guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi;
 - ö. menyiapkan bahan koordinasi dengan PPID jika diperlukan dalam penyelesaian sengketa informasi;
 - aa. menyiapkan bahan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi;
 - bb. melaksanakan pengelolaan data, penyajian dan pengembangan aplikasi serta sistem informasi;
 - cc. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan manajemen pengelolaan data dan informasi;
 - dd. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup umum, kepegawaian, data dan informasi;
 - ee. membuat telaahan staf bahan rumusan kebijakan lingkup umum, kepegawaian, data dan informasi;

- ff. melaksanakan pengawasan dan pengendalian manajemen pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- gg. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup umum, kepegawaian, data dan informasi;
- hh. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- ii. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Sub bagian Keuangan dan Program

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di bidang keuangan dan program.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi:
 - a. menyusun rencana kerja dan program kerja Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
 - d. membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup program dan keuangan;



- e. melaksanakan dan mengoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data administrasi program dalam rangka penyiapan data dan informasi bahan penyusunan rencana kerja daerah lingkup Kecamatan yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja serta rencana kerja dinas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan penyusunan data dan informasi bahan penetapan laporan kinerja Daerah lingkup Kecamatan yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporanlainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- g. menyusun petunjuk teknis operasional administrasi dan pengelolaan keuangan Kecamatan;
- h. melaksanakan pengumpulan data bahan penyusunan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan;
- i. melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan administrasi keuangan, anggaran, pendapatan dan belanja Kecamatan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan dan pembuatan daftar gaji dan tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan;
- k. menganalisa data untuk bahan penyusunan rancangan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- l. melaksanakan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Kecamatan;
- m. melaksanakan pengawasan dan pengendalian manajemen pengelolaan administrasi keuangan;

- n. melaksanakan pengoordinasian, penyiapan bahan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan;
- o. melaksanakan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- p. melaksanakan pengelolaan kearsipan administrasi keuangan Kecamatan;
- q. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup program dan keuangan;
- r. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan pengelolaan dan administrasi keuangan Kecamatan;
- s. melaksanakan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan;
- t. melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup program dan keuangan;
- u. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- v. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. administrasi keuangan dan program kerja Kecamatan.

5. Seksi Pemerintahan

- (1) Seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang pemerintahan

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
- a. menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi Pemerintahan;
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
 - d. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup pemerintahan;
 - e. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum pemerintahan;
 - f. melaksanakan pengoordinasian, penyiapan bahan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi pemerintahan;
 - g. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup administrasi pemerintahan;
 - h. menyiapkan bahan telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan pengelolaan dan administrasi pemerintahan;
 - i. menyiapkan bahan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan lingkup pemerintahan;
 - j. menyelenggarakan pelayanan administrasi pertanahan dan membantu pelaksanaan tugas Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara;

- k. melaksanakan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil serta domisili orang asing;
- l. melaksanakan pembinaan Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
- m. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan pelayanan pemerintahan dengan instansi terkait;
- n. menyusun data dan bahan materi lingkup pelayanan pemerintahan;
- o. melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan Kelurahan;
- p. melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi pemerintahan;
- q. melaporkan pelaksanaan lingkup pemerintahan;
- r. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- s. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:
 - a. menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban;

- b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
- d. membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup ketenteraman dan ketertiban;
- e. melaksanakan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi serta penyusunan laporan pengelolaan ketenteraman dan ketertiban;
- f. menyusun data dan bahan materi lingkup ketenteraman dan ketertiban;
- g. melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota;
- h. melaksanakan pembinaan potensi perlindungan masyarakat;
- i. memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana;
- j. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan ketenteraman dan ketertiban dengan instansi terkait;
- k. melaksanakan pengoordinasian, penyiapan bahan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan ketenteraman dan ketertiban di Kecamatan;
- l. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup ketenteraman dan ketertiban;
- m. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan teknis operasional ketenteraman dan ketertiban;

- n. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan lingkup ketenteraman dan ketertiban di Kecamatan dan Kelurahan;
- o. melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban di Kecamatan;
- p. melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup ketenteraman dan ketertiban di Kecamatan;
- q. melaporkan pelaksanaan lingkup ketenteraman dan ketertiban;
- r. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- s. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

- (1) Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang pendidikan dan kemasyarakatan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:
 - a. menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;

- c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
- d. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup ekonomi dan pembangunan;
- e. menyusun data dan bahan materi lingkup ekonomi dan pembangunan;
- f. memfasilitasi bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- g. menginventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan;
- h. memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- i. memfasilitasi upaya pelestarian lingkungan hidup dan pelaksanaan program kebersihan dan keindahan;
- j. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan ekonomi dan ketahanan pangan, pembangunan dengan Instansi terkait;
- k. melaporkan pelaksanaan kegiatan lingkup ekonomi dan pembangunan;
- l. mengadministrasi kegiatan lingkup ekonomi dan pembangunan;
- m. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup ekonomi dan pembangunan;
- n. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan teknis operasional lingkup ekonomi dan pembangunan di Kecamatan;
- o. menyiapkan bahan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana

kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan lingkup ekonomi dan pembangunan;

p. melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup ekonomi dan pembangunan;

q. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;

r. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Seksi Kesejahteraan Sosial

(1) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Kesejahteraan Sosial.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud sebagaimana ayat (1) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

a. menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;

b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;

c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;

d. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup Kesejahteraan Sosial;

e. menyusun data dan bahan materi lingkup kesejahteraan sosial;



- f. menginventarisasi dan memfasilitasi masalah kesejahteraan sosial;
- g. menginventarisasi potensi bidang kesejahteraan sosial;
- h. melaksanakan pembinaan terhadap lembaga kesejahteraan sosial di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
- i. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan bidang kesejahteraan sosial dengan instansi terkait;
- j. melaporkan pelaksanaan lingkup bidang kesejahteraan sosial;
- k. mengadministrasi lingkup kesejahteraan sosial;
- l. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas kesejahteraan sosial;
- m. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan teknis operasional lingkup kesejahteraan sosial di Kecamatan;
- n. menyiapkan bahan pengendalian program meliputi kegiatan persiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan lingkup kesejahteraan sosial;
- o. melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup kesejahteraan sosial;
- p. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- q. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

9. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang pelayanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
 - d. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup pemberdayaan masyarakat;
 - e. menyusun data dan bahan materi lingkup pemberdayaan masyarakat;
 - f. menginventarisasi dan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat;
 - g. menginventarisasi potensi bidang pemberdayaan masyarakat;
 - h. memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan dan lembaga lainnya di tingkat Kecamatan;
 - i. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dengan Instansiterkait;
 - j. melaporkan pelaksanaan lingkup bidang pemberdayaan masyarakat;

- k. mengadministrasi lingkup pemberdayaan masyarakat;
- l. menyiapkan bahan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan lingkup pemberdayaan masyarakat;
- m. melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pemberdayaan masyarakat;
- n. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- o. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

1.4 Isu Strategis

Pemerintah Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu- isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi

Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung pada tahun 2014 - 2018 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota Bandung. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- 2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- 3) Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
- 4) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.
- 5) Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kota Bandung yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung, sebagai berikut :

- 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
- 5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Pemerintah Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan Penataan Organisasi Manajemen Publik (Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan

pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah membangun sistem dan budaya pelayanan publik yang prima.

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai *stakeholder*, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai *shareholder*.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki

reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah, Pengelolaan Keuangan dan Barang

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excelent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Astanaanyar dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara

negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan good governance.

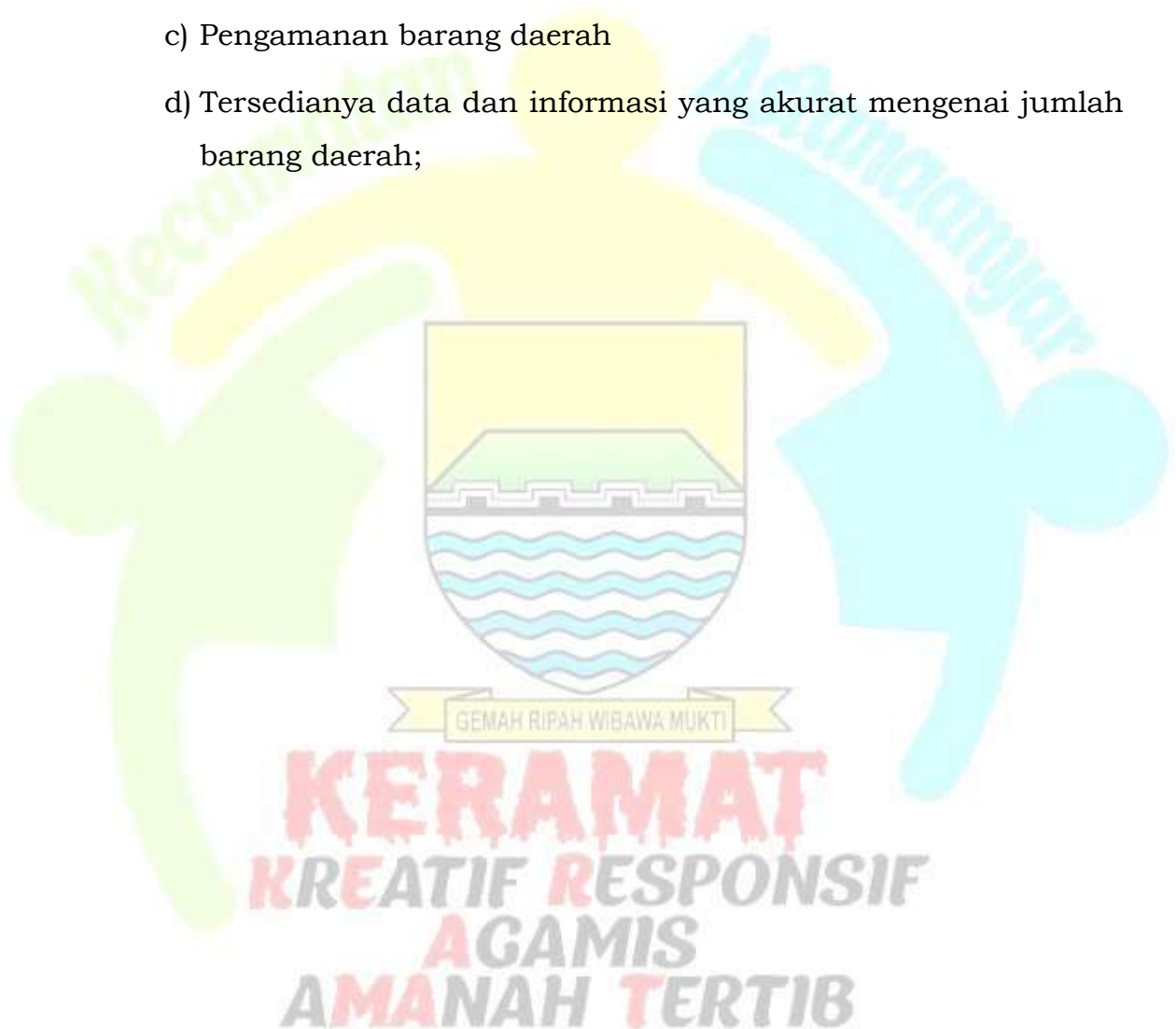
Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam rangka mewujudkan good governance, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada *entrepreneurial management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (*Performance Budget*), bukan pada kebijakan (*Policy Budget*).

Sistem manajemen keuangan daerah (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *good governance* di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu: perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah:



- a) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan
- b) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah;
- c) Pengamanan barang daerah
- d) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah;



3. Janji Walikota dan Wakil Walikota terpilih

Hal penting yang tercantum dalam RPJMD Kota Bandung 2018 - 2023 adalah janji-janji politik selama masa kampanye dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.8
Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

No.	Misi	Indikator
1	Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Youth Space atau Pusat Kreativitas Pemuda. 2. Pojok Baca di Kelurahan, Kecamatan dan PD. 3. Perpustakaan Alun-alun. 4. Pameran Literasi. 5. Disiplin Menyerbang "Martial Art Traffic". 6. Pelatihan Tenaga Potong Ayam. 7. GESAT (Gerakan Salat Tepat Waktu). 8. Insentif Guru Madrasah.
2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif Efisien Bersih dan Melayani	1. Online LAMPID (Layanan Lahir, Mati, Pindah Datang, Pindah Keluar). 2. Gerai Pelayanan Disdukcapil 4 arah mata angin (MIM, PVJ, CIWALK, BTC). 3. Petugas Registrasi Kelurahan. 4. One Day Service Pelayanan Publik
3	Mewujudkan Bandung Nyaman Melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur Serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	1. Kampanye Perubahan paradigma Kumpul-Angkut-Buang menjadi Gerakan #KangPisMan (Kurangi Pisahkan Manfaatkan) #ZeroWasteLifeSyle. 2. Pembangunan Pusat Daur Ulang di Cicabe. 3. Pembuatan Instalasi2 pengolahan sampah skala medium dan TPS2 3R. 4. Perbanyak Bank Sampah Induk & Unit Sedekah Sampah. 5. Sidang Tipiring Pembuang Sampah Liar. 6. Sosialisasi Ulang Tempat Sampah di Kendaraan. 7. Aplikasi edukasi sampah 8. Konversi Angkot. 9. KIR Drive Thru. 10. Pekan Tarif TMB Gope. 11. 50 Sekolah Walk To School. 12. Penanaman Rumput Ajaib di Sungai. 13. Tebar Ikan di Sungai. 14. Angkat Sedimen. 15. Kolam Retensi. 16. Pembangunan Basement Air.
4	Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh dan Berkeadilan	1. Peluncuran Puskesmas. 2. Pembentukan Pilot Koperasi Juara Kelurahan. 3. Pembentukan Satgas Rentenir. 4. ATM Beras. 5. Pembagian 1000 Tanaman Buah-buahan.

Sumber : Bappelitbang Kota Bandung 2018



1.5 Landasan Hukum

LKIP Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kota Bandung Tahun 2018-2023;
10. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan dan Kelurahan dilingkungan Pemerintah Kota Bandung.

1.6 Sistematika

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung Tahun 2019 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategical issue*) yang sedang dihadapi organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ ikstisar Perjanjian Kinerja sebelum dan setelah reuiu

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II



PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan masih mengacu pada Peraturan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. Perencanaan Strategis Sebelum Review

2.1.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung. Rencana Strategis Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Astanaanyar Kota Bandung Nomor 050/011-Kec.Anyar Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung Tahun 2018-2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban



Walikota terkait dengan penetapan /kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023.

Penyusunan Renstra Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera, **“Bandung Juara”**.

Visi Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung Tahun 2019-2023 mengacu pada Misi Kota Bandung adalah :

“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA, DAN AGAMIS”

2. Misi

Dalam mewujudkan visi yang telah disepakati dan ditetapkan, disusun misi organisasi yang merupakan dasar/alasan keberadaan suatu organisasi serta bidang garapan suatu organisasi. Menurut *Kotler* bahwa misi merupakan pernyataan tentang tujuan organisasi yang diwujudkan dalam produk dan pelayanan. Dari batasan tersebut diatas ada beberapa hal yang diperhatikan dalam perumusan misi organisasi, meliputi : produk atau pelayanan yang ditawarkan, tingkat kebutuhan pelanggan akan produk atau pelayanan yang ditawarkan, memiliki sasaran yang akan dilayani, aspiratif terhadap keadaan yang diinginkan di masa mendatang.

Mengacu kepada uraian tersebut diatas, sebagai bentuk nyata dari visi organisasi yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung merumuskan dari 2 misi dan misi ini menggambarkan hal-hal yang harus terlaksana dalam mencapai visi tersebut, yaitu :

- 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Melayani**
- 2. Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi.**

Makna yang terkandung adalah untuk mewujudkan visi masih perlu ditingkatkan kinerja Pemerintahan Kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Bandung Tahun 2018-2023 sebanyak 2 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Rata rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	82,25	82,5	82,75	83
			Persentase temua BPK / Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	100	100	100	100	100
		Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	50	50	66	88	100
2	Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan	54	59	71	83	100

2.1.2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung

telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Camat Astanaanyar Kota Bandung Nomor : 050/012-Kec. Anyar Tahun 2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung.

Adapun Indikator Kinerja Utama Kecamatan Astanaanyar adalah sebagai berikut :

1. Rata-rata Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat;
2. Persentase Kelurahan Unggul
3. Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan;

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

**Indikator Kinerja Utama
 Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung Tahun 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Rata rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Merupakan IKU/PK dan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan	Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan	Indikator penilaian IKM berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)



				Masyarakat (SKM)		
2	Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	Merupakan PK Pelimpahan kewenangan dan dalam rangka mewujudkan janji Wali Kota dan pelimpahan kewenangan	% kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan unggul terhadap jumlah kelurahan	Kriteria Kelurahan Unggul, memenuhi/ melaksanakan minimal 5 dari 12 jenis kondisi di bawah ini :1. Terbentuknya satwankar kelurahan (Tramtib)- Ada kepengurusan- Ada program kerja- Mengikuti pelatihan- Melakukan pemadaman dini bila terjadi kebakaran sebelum pemadam kebakaran datang- Melakukan penyuluhan /motivasi kepada masyarakat-sistem2. Terbentuknya Kampung siaga Bencana (Kagana)- Ada Kepengurusan- Gardu Sosial- Lumbung sosial- Peta Rawan Bencana- Melakukan penyuluhan kepada masyarakat kesiapsiagaan bencana3. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos)- Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca- Memiliki koleksi buku dange; 30 exp-Koran2 / majalah langganan kelurahan- Ada laporan pengunjung4. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah- petunjuk arah ke masjid- ada Pengingat/alrm waktu sholat5. Minimal 2 Kader Jumantik



						<p>tingkat kelurahan (PM)- SK / SP- Ada Program Kerja- Monitoring Rawan Jentik- Melaksanakan penyuluhan/ himbauan per-minggu- Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)6. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM)- Data terpilah- satgas Pengarusutamaan gender (PUG)- Pelatihan pelatihan- Perlindungan bagi perempuan (KDRT)7. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM)- Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK- Memiliki data anak- Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA- Monitoring dan evaluasi8. Septic Tank Komunal (Ekbang)- Minimal untuk 5 rumah- Jarak dengan sumber air bersih dange; 11 meter- Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga- Menggunakan pipa paralon- Menggunakan bak kontrol9. Bank sampah per kelurahan (Ekbang)10.</p>
--	--	--	--	--	--	--



						<p>Menciptakan 1 koperasi unggul setiap kelurahan (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2019) (Ekbang)- Anggota Koperasi dange; 20 orang- Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas- Memiliki Akte Pendirian- Ada usaha simpan pinjam11. Ruas jalan, saluran, kerb dan RTH dalam kondisi terpelihara (Ekbang)Kriteria:a. Kerb terpelihara tidak ada rumput pada nat/ dicat warna hitam putih tidak pudar setiap triwulanb. Jalan terpelihara/tidak ada rumput liar dan sampah setiap triwulanc. Pada saluran air/kali tidak ada gulma, sedimen dan sampah yang mencolok setiap triwuland. Tidak ada sumbatan air dibawah jembatan yang disebabkan amblase. Taman RW dalam kondisi bersih tidak ada sampah dan tidak ada tumbuhan liar serta memotong daun atau ranting keringf. Melakukan penyiraman pada musim kemarau12. Pembentukan Koperasi ditempat ibadah (Ekbang)- Ada</p>
--	--	--	--	--	--	---

						Pengurus- Ada Anggota- Ada AD/ART
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan	%	Merupakan IKU/PK karena Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan	% Rata rata RW Unggul + LKK Unggul + Siskamling Aktif dibagi 3	% RW Unggul (Metode Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat dan 7 dari 16 Kriteria RW Unggul) meliputi : Salah satu dari metode pengelolaan sampah berbasis Masyarakat : 1. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola Komposter skala rumah tangga 2. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola bank sampah 3. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola salah satu metode 3 R 4. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola biodigester 5. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola sampah dengan metode lainnya selain pengangkutan sampah dari rumah ke TPS Kriteria RW Unggul, terdapat minimal melaksanakan / terdapat 7 dari 16 jenis kondisi dibawah ini : 1. Satu Kampung Satu Taman Bermain 2. Balai RW/Markas Karang Taruna 3. Sanggar seni Sunda (Jaipongan/Kecapi Suling, perguruan silat, Rebana/Tagoni dll) 4. Biopori/Sumur



						<p>resapan tiap rumah dan jalan/gang;5. Gapura Kujang;6. Satu Kampung Satu Produk;7. Kampung Berkebun;8. Kampung Caang Baranang;9. MCK komunal;10. Pavingisasi11. Gerakan satu rumah satu tanaman;12. Movie on the move (Layar tancep)/Nonton Bareng13. Media Kampanye Kampung Unggul14. Satu Rumah satu jumantik15. Laporan RW tepat waktu minimal form A : 1. Laporan Kependudukan (Format A1-A5)1. Laporan Program KangPisMan sampah di wilayah RW (Format B dan C)2. Usulan Aspirasi Masyarakat dan Potensi Swadaya Murni1. RW berdaya-Ada kepengurusan-Ada kegiatan pengumpulan ziswa (Zakat, Infak, Shodakoh dan Wakaf)-Adanya kegiatan sosial yang dibiayai hasil ziswa (zakat, infak, shodakoh dan wakaf% LKK UnggulKriteria LKK Aktif :1. Seluruh Lembaga kemasyarakatan Kecamatan/kelurahan mempunyai rencana/agenda/program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan</p>
--	--	--	--	--	--	---

						<p>pemberdayaan sesuai ruang lingkup LKK (Kecamatan/Kelurahan)2. Minimal 60% Ketua / Pengurus Lembaga kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan hadir dalam pembahasan musrenbang Kecamatan3. Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan/kelurahan melaksanakan minimal 75% dari seluruh agenda/program kerja yang direncanakan pada tahun berjalan4. Aktif mengikuti kegiatan / lomba/kejuaraan di tingkat Kota minimal 2 kegiatan dalam satu tahun% Siskamling RW AktifKriteria Siskamling Aktif :1. Adanya Pengurus2. Adanya Kelompok Siskamling3. Adanya Jadwal Siskamling4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)</p>
--	--	--	--	--	--	---

2.1.3. Perjanjian Kinerja 2019

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja

tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung Tahun 2019 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019.

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan tahun 2019 diperjanjikan antara Camat dengan Walikota adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Rata rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82
		Persentase temua BPK / Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	100
2	Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	50
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan	54



BAB III



AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2019. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kecamatan Astanaanyar.

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1.	> 100 %	Melebihi/Melampaui Target
2.	=100 %	Sesuai Target
3.	< 100 %	Tidak Mencapai Target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung
Tahun 2019**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Dark Blue
2	Baik	75.00 – 89.99	Green
3	Cukup	65.00 – 74.99	Orange
4	Kurang	50.00 – 64.99	Yellow
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Red

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2019. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2019 dan Indikator Kinerja Utama SKPD berdasarkan Keputusan Camat Astanaanyar Kota Bandung Nomor : 050/012-Kec.Anyar tahun 2019, telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :



- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Camat Astanaanyar kota Bandung Nomor : 050/012-Kec.Anyar tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan astanaanyar Kota Bandung. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung
Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Rata rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82	84.088	102.55
2	Persentase Kelurahan Unggul	%	50	50	100.00
3	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan	%	54	54	100.00

Sumber data Kecamatan Astanaanyar, 2019

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

- Capaian kinerja pada indikator pertama melebihi target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat** sebesar 102.55%
- Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator Persentase Kelurahan Unggul, dengan capaian kinerja 100 %, pada indikator Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan, dengan capaian kinerja 100 %
- Tidak ada indikator kinerja di Kecamatan Astanaanyar yang capaian kerjanya tidak mencapai target

3.3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung Tahun 2019-2023 sebanyak 3 sasaran.

Tahun 2019 adalah tahun ke 1 pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Astanaanyar, dari sebanyak 3 sasaran strategis dengan sebanyak 4 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja
Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Rata rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82	84.088	102.55
2	Persentase temua BPK / Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	%	100	100	100.00
3	Persentase Kelurahan Unggul	%	50	50	100.00
4	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan	%	54	54	100.00

Sumber data Kecamatan Astanaanyar, 2019

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Kecamatan Astanaanyar pada beberapa table berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran
Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	25.00 %
2	Sesuai Target	75.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0.00 %

Sumber data Kecamatan Astanaanyar, 2019

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 3 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pencapaian target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	3	1	33.33	2	66.67	0	0.00
2	Misi 2	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00
	Jumlah	4	1	25.00	3	75.00	0	0.00

Sumber data Kecamatan Astanaanyar, 2019

Dari sebanyak 3 sasaran dengan sebanyak 4 indikator kinerja, pencapaian kinerja Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5

Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	Misi 1	3	
1	Melebihi/Melampaui Target	1	33.33 %
2	Sesuai Target	2	66.67 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %
B.	Misi 2	1	
1	Melebihi/Melampaui Target	0	0.00 %
2	Sesuai Target	1	100.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di kecamatan lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2019 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 4 indikator kinerja dari sebanyak 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung tahun 2019-2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6

**Analisis Pencapaian Sasaran 1
 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Rata rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	-	-	0.00	82	84.088	102.55
2	Persentase temua BPK / Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	%	-	-	0.00	100	100	100.00

Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Rata rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) " adalah sebesar 84.088 dari target sebesar 82 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun



2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 102.55 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Rata rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) " tahun ini adalah sebesar 102.55 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Astanaanyar maka capaian kinerjanya mencapai 101.31 %. Data penunjang capaian kinerja indikator indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh berdasarkan hasil survey dilaksanakan oleh Tim dari Kecamatan Astanaanyar yang dilakukan secara acak terhadap masyarakat yang menikmati pelayanan di Kecamatan Astanaanyar yaitu masyarakat yang membuat KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu), SKM (Surat Keterangan Miskin), legalisasi, SKCK (Surat Keterangan Catatan kepolisian) dan Administrasi kependudukan lainnya dengan hasil sebagai berikut :

GEMAH RIPAH WIBAWA MUKTI
KERAMAT
KREATIF RESPONSIF
AGAMIS
AMANAH TERTIB



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ASTANAANYAR
 Jl. Bojongloa No. 69 Bandung Tep. (022) 5200419

Tabel 3.8
Nilai Unsur Pelayanan dalam Penilaian Indeks Kepuasan Pelanggan
Di Kecamatan Astanaanyar
Tahun 2019

NO	UNSUR PELAYANAN	Realisasi Tahun 2019															
		Kec. Astanaanyar		Kel. Karasak		Kel. Nyengseret		Kel. Karanganyar		Kel. Panjunan		Kel. Cibadak		Kel. Pelindung Hewan		RATA-RATA	
		Nilai rata2 unsur Pelayanan	Nilai Indeks Unit Pelayanan	Nilai rata2 unsur Pelayanan	Nilai Indeks Unit Pelayanan	Nilai rata2 unsur Pelayanan	Nilai Indeks Unit Pelayanan	Nilai rata2 unsur Pelayanan	Nilai Indeks Unit Pelayanan	Nilai rata2 unsur Pelayanan	Nilai Indeks Unit Pelayanan	Nilai rata2 unsur Pelayanan	Nilai Indeks Unit Pelayanan	Nilai rata2 unsur Pelayanan	Nilai Indeks Unit Pelayanan	Nilai rata2 unsur Pelayanan	Nilai Indeks Unit Pelayanan
1	Persyaratan pelayanan	3,37	0,374	3,47	0,386	3,51	0,390	3,34	0,371	3,29	0,365	3,39	0,376	3,27	0,363	3,38	0,375
2	Kemudahan prosedur Pelayanan	3,28	0,364	3,57	0,396	3,41	0,378	3,33	0,370	3,21	0,356	3,35	0,371	3,26	0,362	3,34	0,371
3	Ketepatan Waktu pelayanan	3,11	0,345	3,59	0,399	3,33	0,369	3,18	0,353	3,40	0,377	3,31	0,368	3,32	0,369	3,32	0,369
4	Kewajaran biaya pelayanan	3,24	0,360	3,53	0,391	3,40	0,377	3,30	0,366	3,37	0,374	3,27	0,363	3,36	0,373	3,35	0,372
5	Kesesuaian produk pelayanan	3,29	0,374	3,59	0,398	3,36	0,373	3,33	0,369	3,72	0,413	3,39	0,377	3,29	0,366	3,42	0,381



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ASTANAANYAR
 Jl. Bojongloa No. 69 Bandung Tep. (022) 5200419

6	Kemampuan Petugas pelayanan	3,37	0,374	3,55	0,394	3,39	0,376	3,29	0,366	3,21	0,357	3,33	0,370	3,31	0,368	3,35	0,372
7	Kesopanan dan Keramahan Pelayanan	3,27	0,363	3,51	0,390	3,40	0,377	3,29	0,366	3,42	0,380	3,35	0,372	3,33	0,370	3,37	0,374
8	Kesesuaian maklumat pelayanan	3,39	0,376	3,54	0,393	3,37	0,374	3,22	0,357	3,62	0,402	3,35	0,372	3,35	0,371	3,41	0,378
9	Tata cara Pengaduan	3,25	0,360	3,42	0,380	3,49	0,387	3,33	0,370	3,43	0,380	3,28	0,364	3,21	0,356	3,34	0,371
Nilai Indeks		3,282		3,526		3,403		3,288		3,403		3,334		3,297		3,362	
IKM Unit Pelayanan		82,048		88,153		85,063		82,196		85,082		83,343		82,418		84,088	
Mutu Pelayanan		A		A		A		A		A		A		A		A	
Kinerja Unit Pelayanan		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik	
Rata - Rata IKM Kecamatan Astanaanyar																	
Rata Mutu Pelayanan Kecamatan Astanaanyar									A								
Rata - Rata Kinerja Unit Pelayanan Kecamatan Astanaanyar									Sangat Baik								

KREATIF RESPONSIF
AGAMIS
AMANAH TERTIB

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa nilai rata-rata unsur pelayanan tertinggi diperoleh dari kesesuaian Produk pelayanan dengan nilai indeks sebesar 3,42. Selain itu pada akhir tahun 2019, Kasi Pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap pelayanan telah berbagai macam produk yang berhubungan dengan administrasi kependudukan yang dapat diterbitkan dan dilayani di Kecamatan Astanaanyar dan ditempatkan pada lokasi yang strategis sehingga mudah dibaca oleh warga masyarakat yang datang

Variabel Penilaian yang dilakukan antara lain :

1. Sistem Pelayanan Terpadu yaitu pelayanan dilakukan dengan metode satu pintu hal tersebut dilakukan untuk menghindari para calo-calo pelayanan, jadi masyarakat bisa langsung bertemu dengan petugas pelayanan dan menyerahkan berkas pelayanan secara langsung dan mendapatkan penjelasan dari petugas pelayanan mengenai persyaratan dan prosedur untuk semua pelayanan;
2. Standar Pelayanan yaitu Dasar hukum jelas, persyaratan terpampang, kejelasan prosedur (SOP), kejelasan tarif (pelayanan gratis), Tata tertib, kode etik, papan nama petugas pelayanan, waktu pelayanan.
3. Menerapkan ISO 9001:2008.

Sedangkan nilai rata-rata unsur pelayanan terendah yaitu dan nilai rata-rata unsur pelayanan terendah diperoleh dari ketepatan waktu pelayanan dengan nilai indeks sebesar 3,32. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2019 tidak ada kepastian waktu dalam menerbitkan Dokumen pelayanan KTP yang memiliki ketergantungan terhadap penyediaan keping KTP. Selama tahun 2019 ketersediaan keping KTP masih mengandalkan

ketersediaan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung

Selain itu pada akhir tahun 2019, Kecamatan Astanaanyar telah melakukan berbagai terobosan khususnya dibidang Ilmu dan Teknologi terutama yang berhubungan dengan pelayanan dokumen kependudukan dan pelayanan lainnya dan melakukan pengantaran langsung ke konsumen atas KTP yang telah selesai diterbitkan.

Adapun perbaikan yang akan dilakukan oleh Kecamatan Astanaanyar untuk mendongkrak nilai unsur yang masih rendah dibanding dengan unsur yang lainnya adalah :

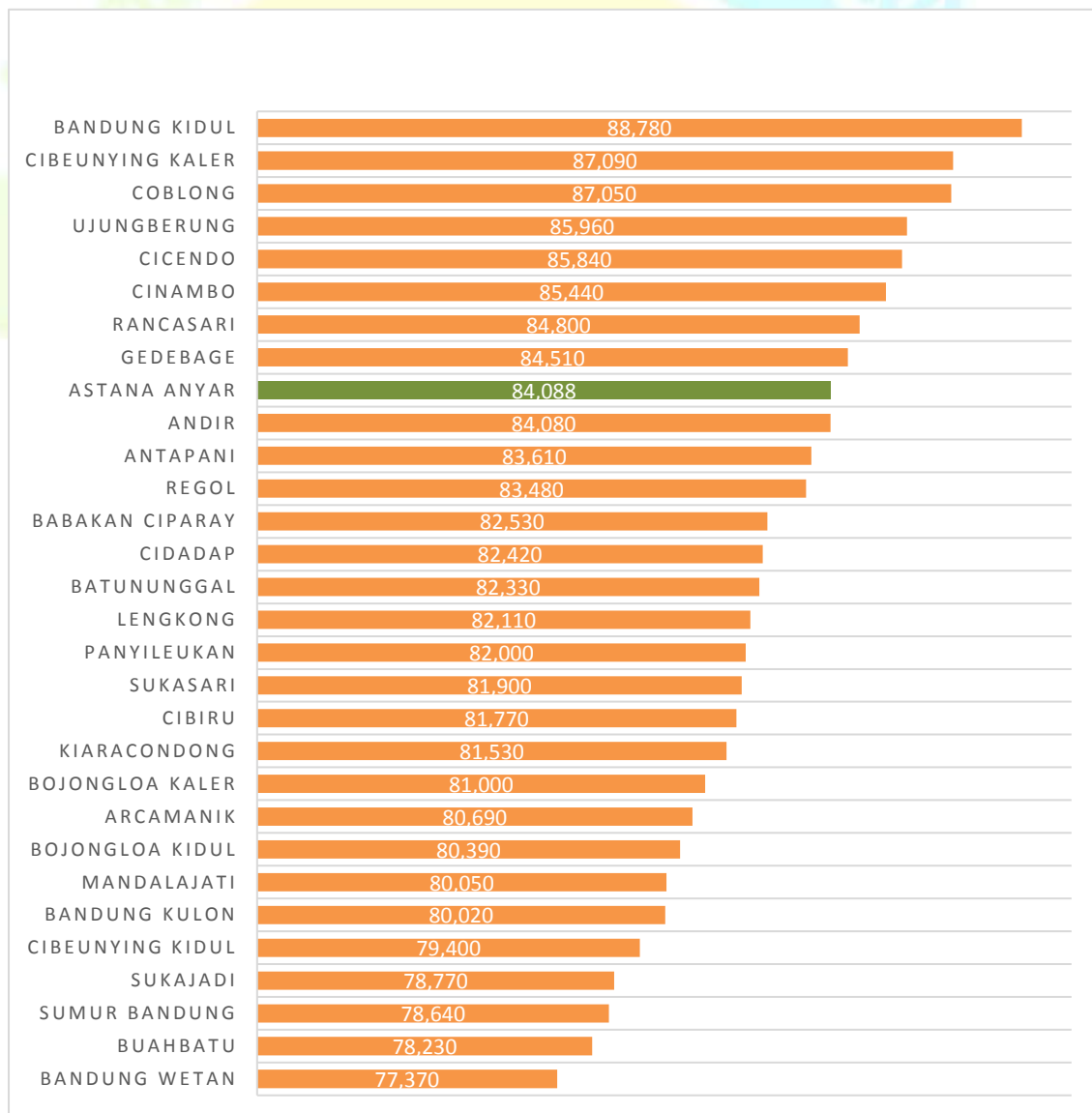
1. Membuat sarana informasi lainnya bidang pelayanan sehingga masyarakat tahu tentang berbagai macam pelayanan yang ada di Kecamatan Astanaanyar beserta persyaratan yang harus dipenuhi.
2. Mensosialisasi media sosial sebagai sarana komunikasi dengan warga masyarakat sehingga pelayanan yang diberikan menjadi lebih efektif dan menjamin kepastian hasil pelayanan kepada warga;
3. Melaksanakan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas tenaga pelayanan baik tingkat kecamatan maupun tingkat kelurahan;
4. Melaksanakan monitoring pelayanan secara berkala, sehingga kita bisa secara terus menerus dan berkesinambungan melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun capaian kinerja nyata indikator **Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 84,088** bila

dibandingkan dengan Kecamatan lainnya di Kota Bandung adalah sebagai berikut :

Grafik 3.1

Grafik Perbandingan Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat dengan Kecamatan Lainnya di Kota Bandung



Dari Grafik diatas dapat dilihat bahwa Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Kota Bandung yang tertinggi sebesar 88,780 pada Kecamatan Bandung Kidul dan terendah sebesar 77,370 pada Kecamatan Bandung Wetan. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Astanaanyar mendapat 88.088 (kategori sangat baik) dan berada pada urutan 9 dari jumlah 30 Kecamatan yang ada di Kota Bandung.

Adapun selisih nilai dengan nilai IKM terbesar (Kecamatan Bandung Kidul) adalah 4,692, sedangkan selisih nilai dengan Kecamatan yang memperoleh nilai IKM terkecil adalah 6,718 (Kecamatan Bandung Wetan).


Kecamatan Astanaanyar perlu mengadakan perbaikan-perbaikan pada nilai unsur-unsur yang masih kurang yaitu kenyamanan lingkungan dan keamanan lingkungan untuk meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat dengan cara:

1. Menata ulang interior ruang pelayanan;
2. Pembaruan meubeulair untuk ruang tunggu di pelayanan;
3. Pemasangan AC di ruang pelayanan;
4. Pemasangan CCTV di ruang Pelayanan;
5. Piket petugas Trantib Kecamatan di depan ruang pelayanan dan pintu gerbang Kecamatan;
6. Sarana dan Prasarana lainnya yang diperlukan.

Berikut adalah data evaluasi Kinerja Unit Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Astanaanyar :

Tabel 3.9

**Evaluasi Kinerja Unit Pelayanan masyarakat
 Di Kecamatan Astanaanyar Tahun 2019**

No	Variabel Penilaian	Kategori	Komponen Indikator	Bobot Nilai Variabel	Nilai	Foto Bukti
1	Sistem Pelayanan Terpadu	Utama	Satu Atap / Satu Pintu	60	60	

GEMAH RIPAH WIBAWA MUKTI
KERAMAT
KREATIF RESPONSIF
AGAMIS
AMANAH TERTIB

2	Standar Pelayanan	Utama	1. Dasar Hukum	50	50	 
			2. Persyaratan	50	50	
			3. Sistem Mekanisme dan Prosedur			

KERAMAT
KREATIF RESPONSIF
AGAMIS
AMANAH TERTIB



			• SOP	50	50	 
			• Bagan Alur	50	50	
		4.	Produk Pelayanan	50	50	

KERAMAT
KREATIF RESPONS
AGAMIS
AMANAH TERTIB



		5.	Jangka Waktu Penyelesaian	100	100	
		6.	Biaya / Tarif	100	100	
		7.	Sarana, Prasarana, atau Fasilitas			
			• Ruang Tunggu	20	20	
			• Pendingin Ruangan / AC	10	10	



			<ul style="list-style-type: none"> Tempat Duduk 	20	20	
			<ul style="list-style-type: none"> Sarana Antrian (tiket) 	10	10	
			<ul style="list-style-type: none"> Toilet 	10	10	
			<ul style="list-style-type: none"> Televisi 	10	10	
			<ul style="list-style-type: none"> Loket / Meja Pelayanan 	10	10	
			<ul style="list-style-type: none"> Tempat Parkir yang Memadai 	10	10	

			8. Profile Pelaksana / Jumlah Pelaksana	20	20	
			9. Tata Tertib	10	10	
			10. Kode Etik	10	10	
3	Maklumat Pelayanan	Utama	Ketersediaan Maklumat Pelayanan	50	50	
4	Sistem Informasi Pelayanan Publik	Utama	Ketersediaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Secara Manual atau Elektronik (Booklet/Pamflet/Banner/Website,dsb)	100	100	
5	Pelayanan Khusus	Utama	Sarana Khusus Bagi Pengguna Layanan Berkebutuhan Khusus			



			<ul style="list-style-type: none"> • Ram 	5	5	
			<ul style="list-style-type: none"> • Jalur Pemandu 	5	5	
			<ul style="list-style-type: none"> • Pegangan Rambatan 	5	5	
			<ul style="list-style-type: none"> • Tombol Lift Timbul & Suara 	0	0	
			<ul style="list-style-type: none"> • Toilet Khusus 	5	5	
			<ul style="list-style-type: none"> • Ruang Khusus Ibu Menyusui dan Anak 	5	5	
			<ul style="list-style-type: none"> • Loket Khusus 	5	0	
6	Pengelolaan Pengaduan	Utama	1. Mempunyai Unit Pengaduan Khusus yang Mengelola Unit Pengaduan ?	10	10	

			2. Pejabat Pengelola Pengaduan	20	20	
			3. Loker Pengaduan / Ruang Pengaduan	10	10	
			4. Sarana Pengaduan (SMS/Telpon/Fax/email /dll)	20	20	
			5. Informasi Prosedur / Tata Cara Pengaduan	10	10	
			6. Informasi Pengelolaan Pengaduan yang Dipajang di Ruang Pengelola Pengaduan dan atau di Ruang Pelayanan	10	10	
7	Penilaian Kinerja	Utama	Sarana Pengukuran Kepuasan Pelanggan	20	0	



8	Visi Misi dan Moto	Tamba han	1. Visi dan Misi	20	2 0	
			2. Moto	10	10	



9	ISO 9001:2008	Tambahan	Adopsi ISO 9001:2008	20	0	
10	Atribut	Tambahan	1. Petugas Penyelenggara Layanan Menggunakan Pakaian Seragam ?	10	10	
			2. Petugas Penyelenggara Layanan Menggunakan ID Card ?	10	10	
JUMLAH				1000	955	

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu" adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 2 **"Presentase Temuan BPK / Inspektorat yang ditindak lanjuti taprt Waktu"** tahun ini adalah sebesar 100,00%, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Astanaanyar maka capaian kerjanya mencapai 100,00.

Gambar 3.1.

Hasil Kinerja tindak lanjut BPK dan Inspektorat

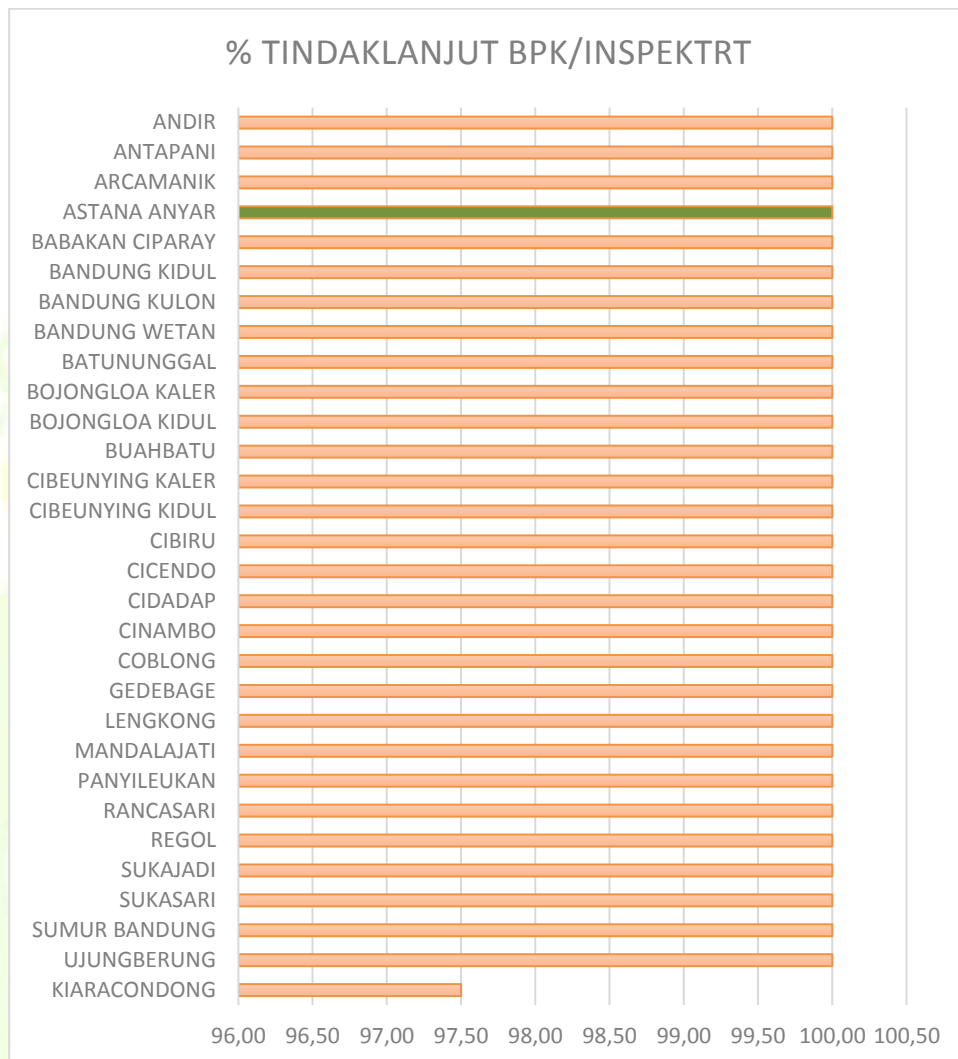
NO	TAHUN PEMERIKSAAN	URAIAN	REKOMENDASI	STATUS TINDAK LANJUT		
				SESUAI (S)	DALAM PROSES (D)	BELUM DITINDAKLANJUTI (B)
				KEWAJIBAN SETOR	SUDAH SETOR	SSA SETOR
			JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH
I	TAHUN 2013	1. STATUS TLHP	4	4	0	0
		2. KEWAJIBAN SETOR	0	0	0	0
II	TAHUN 2014	1. STATUS TLHP	4	4	0	0
		2. KEWAJIBAN SETOR	11.642.995	11.642.995	11.642.995	0
III	TAHUN 2015	1. STATUS TLHP	13	13	0	0
		2. KEWAJIBAN SETOR	16.823.478	16.823.478	16.823.478	0
IV	TAHUN 2016	1. STATUS TLHP	17	17	0	0
		2. KEWAJIBAN SETOR	29.901.711	29.901.711	29.901.711	0
V	TAHUN 2017	1. STATUS TLHP	3	3	0	0
		2. KEWAJIBAN SETOR	0	0	0	0
VI	TAHUN 2018	1. STATUS TLHP	4	4	0	0
		2. KEWAJIBAN SETOR	193.633.410	193.633.410	193.633.410	0
VII	TAHUN 2019	1. STATUS TLHP	3	3	0	0
		2. KEWAJIBAN SETOR	0	0	0	0

Pada tahun 2019 ini, Kecamatan Astanaanyar secara konsisten dapat menindaklanjuti temuan inspektorat yang tergambar dari gambar 3.1. diatas.

Adapun capaian kinerja nyata indikator **"Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu"** bila dibandingkan dengan Kecamatan lainnya di Kota Bandung adalah sebagai berikut :

Grafik 3.2

Grafik Perbandingan Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti dengan Kecamatan Lainnya di Kota Bandung



Dari Grafik diatas dapat dilihat bahwa Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu di Kota Bandung sudah ditindaklanjuti seluruhnya oleh hampir semua Kecamatan di Kota Bandung, hanya ada satu Kecamatan yang Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu tidak 100% yaitu Kecamatan kiara Condong.

Capaian kinerja sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan masyarakat didukung oleh Program :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (program penunjang)

Output dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah tersedianya kebutuhan listrik, air, telepon, internet, STNK kendaraan dinas operasional, jasa kebersihan kantor, jasa pemeliharaan peralatan kantor, barang cetakan dan penggandaan, alat listrik dan penerangan kantor, alat dan bahan pembersih, makan dan minum rapat, tamu, biaya perjalanan dinas luar daerah;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (program penunjang)

Output dari program beserta kegiatan-kegiatan di dalamnya adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai, peralatan dan perlengkapan aparatur yang memadai, pemeliharaan kendaraan operasional, gedung kantor yang memadai;

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur (program penunjang)

Output dari program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya;

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (program penunjang)

Output dari program dan kegiatan ini adalah pembinaan aparatur, membangun kerja sama tim, membangun karakter dari aparatur

5. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum.



Output dari program dan kegiatan ini adalah terpeliharanya sarana dan prasarana umum yang diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan warga masyarakat terdiri Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan lingkungan, Pemeliharaan RTH Kecamatan dan Pengecatan Kerb Bahu Jalan.

6. Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan.

Output dari program dan kegiatan ini adalah pelayanan administrasi kependudukan termasuk didalamnya penerbitan KTP dan kartu Keluarga dan Administrasi Kependudukan lainnya serta Pembinaan RT RW.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10

Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Sasaran Pertama “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik”

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	OUTPUT	DAMPAK BAIK/ KURANG
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.936.243.402	1.859.902.641	Air, Listrik, Telepon, Surat Kabar, Internet, STNK, Jasa Kbersihan Kantor, Pemeliharaan peralatan kantor, ATK, Cetak dan Penggandaan, Alat listrik, Alat dan bahan pembersih, makan dan minum, Rapat Koordinasi	Baik



					dan Konsultansi Luar Daerah	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		2.869.893.430	2.640.345.994	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai, peralatan dan perlengkapan aparatur yang memadai, pemeliharaan kendaraan operasional, gedung kantor yang memadai	Baik
3	Program Peningkatan Disiplin aparatur		90.956.250	89.163.250	tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya	Baik
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100.000.000	99.640.000	pembinaan aparatur, membangun kerja sama tim, membangun karakter dari aparatur	Baik
5	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum		2.108.014.789	2.095.759.200	terpeliharanya sarana dan prasarana umum yang diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan warga masyarakat terdiri Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan lingkungan, Pemeliharaan RTH Kecamatan dan Pengecatan Kerb Bahu Jalan	Baik
6	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan		1.474.745.524	1.398.510.050	pelayanan administrasi kependudukan termasuk dan Pembinaan RT RW	Baik

AMANAH TERTIB

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan masyarakat disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Anggaran yang memadai ditunjang oleh swadaya murni masyarakat

2. Peran aktif masyarakat Kecamatan Astanaanyar
3. Program dan kegiatan yang terarah dari RPJMD sampai dengan PK Kecamatan Astanaanyar

Faktor Penghambat

1. Peraturan yang mengatur pelaksanaan teknis berubah-ubah
2. Pengesahan APBD dan APBDP Kota Bandung yang lambat
3. Kurangnya koordinasi SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Kecamatan Astanaanyar
4. Kurangnya kebutuhan jumlah SDM aparatur dalam pengorganisasian kegiatan dan pendokumentasian;

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan masyarakat, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/ solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Penetapan peraturan yang mengatur pelaksanaan teknis secara pasti dan lebih awal;
2. Koordinasi SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Kecamatan Astanaanyar lebih ditingkatkan;
3. Permohonan penambahan jumlah SDM aparatur dalam pengorganisasian kegiatan dan pendokumentasian;
4. Penguatan Regulasi dan aturan ditetapkan lebih cepat dan dan lebih jelas sehingga tidak menimbulkan multi tafsir SOP, Prosedur dan regulasi mengenai pelayanan public akan dipublikasikan lebih luas kepada masyarakat;
5. Mengangkat seorang Pejabat Struktural untuk menjadi pejabat pengaduan, Informasi Prosedur tata cara pengaduan akan dibuat dan di pampang di ruang pelayanan

Sasaran 2

Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat dalam
keamanan dan kenyamanan lingkungan

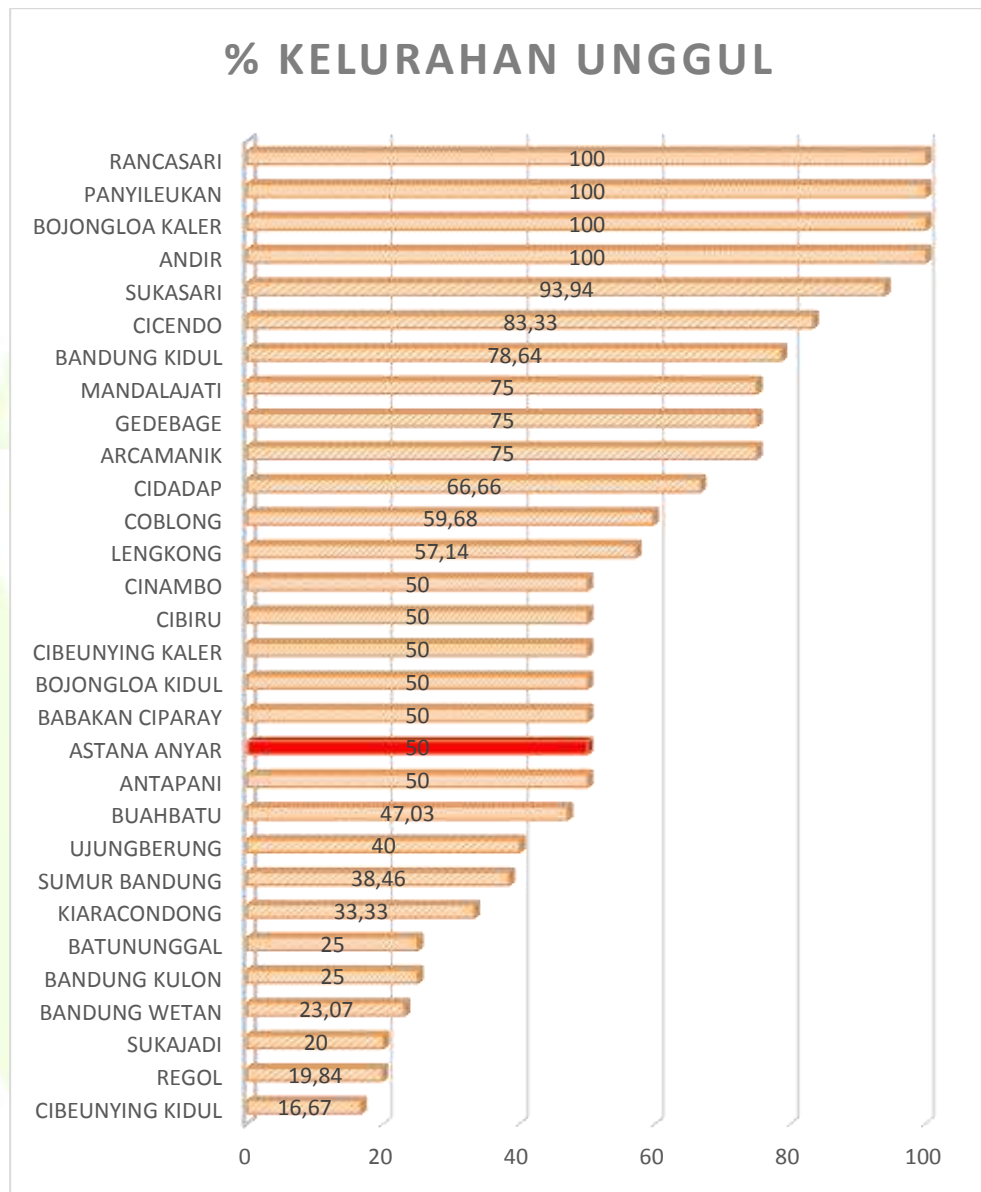
No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Persentase Kelurahan Unggul	%			0.00	50	50	100.00

Sasaran Meningkatkan peran kelembagaan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu:

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Kelurahan Unggul" adalah sebesar 50 dari target sebesar 50 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase Kelurahan Unggul" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Astanaanyar maka capaian kinerjanya mencapai 50.00 %

Adapun capaian kinerja nyata indikator "**Persentase Kelurahan Unggul**" bila dibandingkan dengan Kecamatan lainnya di Kota Bandung adalah sebagai berikut:



Dari Grafik diatas dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja “Persentase Kelurahan Unggul” di Kota Bandung yang tertinggi sebesar 100% pada 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Rancasari, Kecamatan Panyileukan, Kecamatan Bojongloa Kaler dan Kecamatan Andir. Kecamatan terendah sebesar 16.67% yaitu Kecamatan Cibeunying Kidul. Capaian Kinerja “Persentase Kelurahan Unggul” di Kecamatan Astanaanyar sebesar 50%

dan berada pada urutan 14 bersama 7 Kecamatan lainnya di Kota Bandung dengan nilai Capaian Kinerja sama dari jumlah 30 Kecamatan yang ada di Kota Bandung.

Output program dan kegiatan yang berhubungan dengan **Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan** tersebut antara lain terbentuknya Satwankar; terbentuknya Kampung Siaga bencana; Pojok Baca/Taman Baca; Gerakan menyemarakkan Tempat Ibadah; Minimal 2 kader Jumantik tingkat Kelurahan; Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan per kelurahan; Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (Tempat bermain anak); Seftictank Comunal; Bank sampah per kelurahan; menciptakan satu koperasi unggul tiap kelurahan (Pembentukan Satgas Anti Rentenir); Ruas jalan, saluran, kerb dan RTH dalam kondisi terpelihara; pembentukan koperasi di tempat ibadah, siskamling aktif dimana output tersebut menunjang pencapaian kinerja sasaran. Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.16

Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Sasaran Kedua “Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan di Kecamatan Astanaanyar”

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	OUTPUT	DAMPAK BAIK/ KURANG
1	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan		1.475.222.830	1.402.751.080		Baik



		Kegiatan Pengendalian keamanan lingkungan	1.475.222.830	1.402.751.080	Pembentukan Satwankar, Siskamling Aktif	Baik
2	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		36.683.233	31.981.250		Baik
		Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kewilayahan	36.683.233	31.981.250		Baik
3	Program Pemberdayaan KUMKM		23.371.400	21.274.500		Baik
		Kegiatan Pemberdayaan KUMKM Kewilayahan	23.371.400	21.274.500	menciptakan satu koperasi unggul tiap kelurahan (Pembentukan Satgas Anti Rentenir); terpelihara; pembentuka koperasi di tempat ibadah	Baik
4	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat		258.930.000	252.936.900		Baik
		Kegiatan Penguatan	134.800.000	134.267.900	Pusat Pelayanan dan	Baik



		Kelembagaan Masyarakat			Pemberdayaan Perempuan per Kelurahan	
		Kegiatan Penguatan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat	5.550.000	3.164.000	Pojok Baca, Gerakan menyemarakkan Tempat Ibadah	baik
		Kegiatan Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif	118.580.000	115.505.000	Pusat Pengembangan dan Kreativitas anak. Bank sampah per kelurahan	Baik
5	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial		533.359.000	502.228.000		baik
		Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan	533.359.000	502.228.000	Minimal 2 kader Jumantik tingkat Kelurahan , Kampung Siaga Bencana	Baik

Sasaran 3

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat



No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan	%	-	-	0.00	54	54	100.00

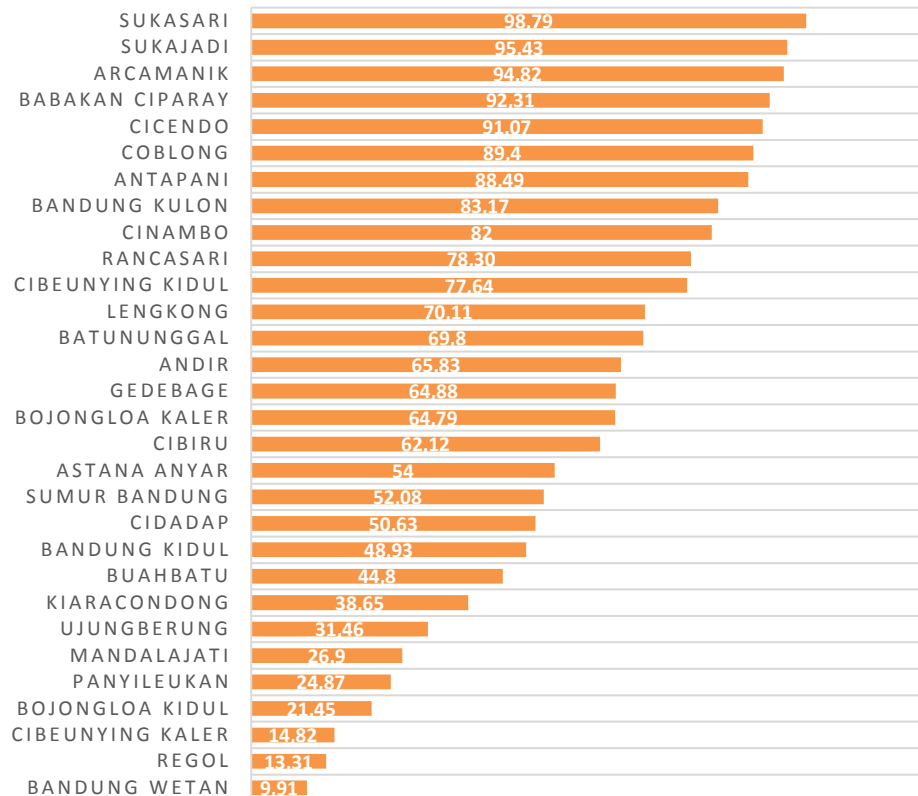
Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan" adalah sebesar 54 dari target sebesar 54 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Astanaanyar maka capaian kinerjanya mencapai 54.00 %.

Adapun capaian kinerja nyata indikator "**Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan**" bila dibandingkan dengan Kecamatan lainnya di Kota Bandung adalah sebagai berikut:

% TINGKAT PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN



Dari Grafik diatas dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja **“Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan”** di Kota Bandung yang tertinggi sebesar 98,97% pada Kecamatan Rancasari dan Kecamatan terendah sebesar 9,91% yaitu Kecamatan Bandung Wetan. Capaian Kinerja **“Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan”** di Kecamatan Astanaanyar sebesar 54% dan berada pada urutan 18 dari jumlah 30 Kecamatan yang ada di Kota Bandung.

Output program dan kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan Pemberdayaan masyarakat tersebut antara lain

- RW Unggul

Minimal memenuhi salah satu metode pengolahan sampah berbasis masyarakat dan 50 % kegiatan anggaran



pemberdayaan RW mendukung tercapainya program kerja Wali Kota dan RPJMD Kota Bandung

- PKK Unggul,

Minimal memenuhi 60% kegiatan anggaran pemberdayaan PKK mendukung tercapainya program kerja Wali Kota dan RPJMD Kota Bandung

- Karang Taruna Unggul dan

Minimal memenuhi 60% kegiatan anggaran pemberdayaan Karang Taruna mendukung tercapainya program kerja Wali Kota dan RPJMD Kota Bandung

- LPM Unggul.

Minimal memenuhi 60% kegiatan anggaran pemberdayaan LPM mendukung tercapainya program kerja Wali Kota dan RPJMD Kota Bandung

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.16

Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Sasaran
Ketiga “Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat
di Kecamatan Astanaanyar”

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	OUTPUT	DAMPAK BAIK/ KURANG
1	Program		6.498.764.443	5.173.254.806		



Pemberdayaan Kewilayahan						
	Pemberdayaan Lingkup RW	4.700.126.258	3.925.324.356	47 RW	Baik	
	Pemberdayaan Lingkup PKK	598.831.684	431.389.400	6 LKK	Baik	
	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	600.774.080	371.822.750	6 LKK	Baik	
	Pemberdayaan Lingkup LPM	599.032.421	444.718.300	6 LKK	Baik	

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Terwujudnya Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Astanaanyar disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut:

Faktor pendukung :

1. Anggaran dan Swadaya murni masyarakat
2. Peran aktif masyarakat Kecamatan Astanaanyar

Faktor Penghambat

1. Peraturan yang mengatur pelaksanaan teknis berubah-ubah
2. Kurangnya koordinasi SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Kecamatan Astanaanyar
3. Kurangnya kebutuhan jumlah SDM aparatur dalam pengorganisasian kegiatan dan pendokumentasian
4. Masih kurangnya sosialisasi dan pembinaan terhadap apatur di kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan, RT dan RW;

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Terwujudnya Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Astanaanyar, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Penetapan peraturan dan penganggaran yang mengatur pelaksanaan teknis secara pasti dan lebih awal.
2. Koordinasi SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Kecamatan Astanaanyar lebih ditingkatkan.
3. Permohonan penambahan jumlah SDM aparatur dalam pengorganisasian kegiatan dan pendokumentasian;
4. Melaksanakan lebih banyak sosialisasi dan pembinaan kepada Kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan, RT dan RW;

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2019 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 33.140.551.376,21 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. 12.921.898.758,00 yang merupakan komponen gaji dan tunjangan, serta Belanja Langsung (BL) Rp. 20.218.652.618,21 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 30.288.450.743,00 terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. 12.165.428.641,00 dan Belanja Langsung (BL) Rp. 18.123.022.102,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 91,39%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2019 kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 2.852.100.633,21. Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien.

Sedangkan mengenai posisi aktiva, kewajiban dan ekuitas dana per 31 Desember 2019. Neraca Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung per 31 Desember 2019 ditutup dengan jumlah akhir sebesar Rp.22.483.084.789,00 atau naik sebesar 17.32%



dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 22.483.084.789,00. Nilai aset sebesar Rp. 22.483.084.789,00 tersebut, terdiri dari aset lancar sebesar Rp. 12.537.854,00 aset tetap Rp. 22.451.985.079,00 dan aset lainnya sebesar Rp. 18.561.856,00 sedangkan nilai kewajiban dan ekuitas Rp. 22.483.084.789,00 terdiri dari : kewajiban sebesar Rp. 29.458.938.744,00, dan ekuitas sebesar Rp. (6.990.853.955),00.





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ASTANAANYAR
 Jl. Bojongloa No. 69 Bandung Tep. (022) 5200419



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
NERACA
 Per 31 Desember 2019 dan 2018
 (Dalam Rupiah)

Urutan Pemerintahan : 4 - 05		Urutan Pemerintahan Fungsional : Fungsional Lainnya	
Unit Organisasi : 4 - 05 - 17		Kecamatan Astanaanyar	
KD. REK	URAIAN	2019	2018
1	ASET		
1.1	ASET LAYAKAR		
1.1.1	Kas	138.884,00	0,00
1.1.2	Invansi Jangka Pendak	0,00	0,00
1.1.3	Rutang	0,00	0,00
1.1.4	Rutang Lainlain	0,00	0,00
1.1.5	Paradokan	0,00	0,00
1.1.6	Biaya Di Bayar Dimuka	0,00	0,00
1.1.7	Pemilihan Rutang	0,00	0,00
	JUMLAH ASET LAYAKAR	138.884,00	0,00
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
1.2.1	Invansi Non Permanen	0,00	0,00
1.2.2	Invansi Permanen	0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
1.3	ASET TETAP		
1.3.1	Tanah	0,00	0,00
1.3.2	Peralatan dan Mesin	722.940.810,00	13.882.000,00
1.3.3	Gedung dan Bangunan	3.325.128.304,00	4.031.421.197,00
1.3.4	Jalan, Jembatan dan Infrastuktur	448.020.500,00	0,00
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	14.212.000,00	0,00
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	0,00	0,00
	JUMLAH ASET TETAP	6.575.599.414,00	4.017.303.197,00
1.4	DANA CADANGAN		
1.4.1	Dana Cadangan	0,00	0,00
	JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA		
1.5.1	Tagihan Rutang Perjual an Anggaran	0,00	0,00
1.5.2	Tagihan Turunan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
1.5.3	Kemungkinan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
1.5.4	Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
1.5.5	Aset Lainlain	0,00	0,00
1.5.6	Aset Rusak Berat / Praktek Penghapusan	0,00	0,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	6.575.599.414,00	4.017.303.197,00
2	KEWAJIBAN		
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
2.1.1	Utang Pihak Dengan Pihak Ketiga (PMK)	138.884,00	0,00
2.1.2	Utang Bunga	0,00	0,00
2.1.3	Utang Pajak	0,00	0,00
2.1.4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
2.1.5	Pendapatan Ditangguhkan Dimuka	0,00	0,00
2.1.6	Utang Jangka Pendak Lainnya	0,00	0,00
2.1.7	Utang Balian	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	138.884,00	0,00
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
2.2.1	Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
2.2.2	Utang Luar Negeri	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	138.884,00	0,00
3	EKUITAS DANA		
3.1	EKUITAS DANA LAYAKAR		
3.1.1	Sisa Labah Pembayaan Anggaran (SILPA)	(30.285.485.745,00)	(30.285.485.745,00)
3.1.2	Cadangan untuk Rutang	0,00	0,00
3.1.3	Cadangan untuk Paradokan	0,00	0,00
3.1.4	Dana yang harus diadakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendak	0,00	0,00
3.1.5	Pendapatan yang Ditangguhkan	0,00	0,00
3.1.6	Salah Kasda	0,00	0,00

Halaman 1 dari 2

AMANAH TERTIB



NO. REK	URAIAN	2018	2019
3.1.7	Saluran air/Gal. Baur Dilarang Daur JUMLAH EKUITAS DANA LAIN-LAIN	0,00 (30.288.485.743,00)	0,00 (30.388.485.743,00)
3.2	Ekuitas Dana Investasi		
3.2.1	Dimekankan dalam Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
3.2.2	Dimekankan dalam Aset Tetap	4.571.095.914,00	4.571.301.157,00
3.2.3	Dimekankan dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk Dana Cadangan)	0,00	0,00
3.2.4	Dana yang harus disediakan untuk penyelesaian hutang jangka panjang	0,00	0,00
	JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	4.571.095.914,00	4.571.301.157,00
3.3	Ekuitas Dana Cadangan		
3.3.1	Dimekankan dalam Dana Cadangan	0,00	0,00
	JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN	0,00	0,00
3.4	KORSI EKUITAS		
3.4.1	Korisi Duit	0,00	0,00
	JUMLAH KORSI EKUITAS	0,00	0,00
	JUMLAH EKUITAS DANA	(23.711.296.319,00)	(23.371.182.546,00)
	JUMLAH KOWARSIAN DAN EKUITAS DANA	(23.711.649.665,00)	(23.371.182.546,00)

WALI KOTA BANDUNG

OED HONAHAD DAHAL

Adapun untuk realisasi belanja langsung dan tidak langsung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.18
Realisasi Anggaran BTL, BL dan Belanja Pemeliharaan
Kantor Kecamatan Astanaanyar
Tahun Anggaran 2019

No	Urusan Wajib	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung			Total Belanja Langsung	Relisasi Belanja	Belanja Pemeliharaan	%
			Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal				
17	Kecamatan Astanaanyar	11.123.673.087	4.215.692.000	10.531.901.939	2.558.396.217	17.305.990.156	28.429.663.243	3.139.423.516	90,98

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.19
Pagu dan Realisasi Anggaran Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung
Tahun 2019

NO	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
			Anggaran (Rp.)	%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.936.243.402.25	1.859.902.641.00	96.06
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	170.483.675.65	137.120.672.00	80.43
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12.995.550.00	7.345.600.00	56.52
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	4.800.000.00	4.700.000.00	97.92
4	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	41.250.000.00	38.058.500.00	92.26
5	Penyediaan alat tulis kantor	157.645.145.71	155.939.286.00	98.92
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	173.674.650.00	170.170.750.00	97.98
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	29.662.639.00	28.847.923.00	97.25
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	235.540.830.05	232.746.400.00	98.81
8	Penyediaan peralatan rumah tangga	65.857.432.44	64.146.470.00	97.40
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	26.690.000.00	24.207.000.00	90.70
10	Penyediaan makanan dan minuman	260.643.479.40	249.774.918.00	95.83
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	135.000.000.00	134.845.122.00	99.89
12	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	622.000.000.00	612.000.000.00	98.39
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.869.893.430.40	2.640.345.994.00	92.00
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	-	-	-
2	Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	331.960.430.40	330.861.000.00	99.67
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	433.000.000.40	423.090.592.00	97.71
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	629.533.000.00	591.802.630.00	94.01
5	Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	1.475.400.000.00	1.294.591.772.00	87.75
	Program peningkatan disiplin aparatur	90.956.250.00	89.163.250.00	98.03
1	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	90.956.250.00	89.163.250.00	98.03
2	Pengadaan pakaian Korpri	-	-	-



3	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	-	-	-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.000.000.00	99.640.000.00	99.64
1	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	100.000.000.00	99.640.000.00	99.64
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1.475.222.830.00	1.402.751.080.00	95.09
1	Pengendalian Keamanan Lingkungan	1.475.222.830.00	1.402.751.080.00	95.09
	Program Perencanaan Pembangunan daerah	36.683.233.00	31.981.350.00	87,18
1	Kegiatan penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kewilayahan	36.683.233.00	31.981.350.00	87.18
	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	1.474.745.524.60	1.398.510.050.00	91.66
1	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan Kewilayahan	36.869.524.60	33.795.050.00	91.66
2	Kegiatan Pembinaan RT RW	1.437.876.000.00	1.364.715.000.00	95.57
	Pemberdayaan KUMM	23.371.400.00	21.274.500.00	91.03
1	Pemberdayaan KUMKM Kewilayahan	23.371.400.00	21.274.500.00	91.03
	Program pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	258.930.000.00	252.936.900.00	97.69
1	Penguatan Kelembagaan Masyarakat	134.800.000.00	134.267.900.00	99.61
2	Penguatan Sumber Daya Manusia dan Partidipasi Masyarakat	5.550.000.00	3.164.000.00	57.01
3	Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif	118.580.000.00	115.505.000.00	97.41
	Program Pemberdayaan Kewilayahan	6.498.764.443.68	5.173.254.806.00	79.60
1	Pemberdayaan Lingkup RW	4.700.126.258.68	3.925.324.356.00	83.52
2	Pemberdayaan Lingkup PKK	598.831.684.00	431.389.400.00	72.04
3	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	600.774.080.00	371.822.750.00	61.89
4	Pemberdayaan Lingkup LPM	599.032.421.00	444.718.300.00	74.24
	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	533.395.000.00	502.228.000.00	94.16
1	Kegiatan Peningkatan SDM Kesejahteraan Sosial Kecamatan	533.395.000.00	502.228.000.00	94.16
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	2.108.014.789.00	2.095.759.200.00	99.42
1	Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	1.969.049.830.00	1.958.463.700.00	99,61
2	Pemeliharaan RTH Kecamatan	119.234.859.00	114.870.500.00	96.34
3	Pengecatan Kerb Bahu Jalan	22.730.100.00	22.425.000.00	98.66
	JUMLAH	19.523.866.302.93	17.305.990.156.00	88.64

Dari table diatas dapat dilihat bahwa penyerapan anggaran Kecamatan Astanaanyar pada tahun 2019 sebesar 88,64% sudah cukup baik, hal tersebut menunjukkan komitmen yang tinggi dari aparatur Kecamatan Astanaanyar untuk melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Adapun Pagu dan realisasi anggaran Kecamatan Astanaanyar per sasaran dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.20

Pagu dan Realisasi Anggaran Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung persasaran Tahun 2019

No.	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	8.579.853.395	8.183.321.135	95,34
2	Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan di Kecamatan Astanaanyar	4.445.248.464	3.949.414.215	88.85
3.	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Astanaanyar	6.498.764.443.68	5.173.254.806.00	79.60
	Jumlah	19.523.866.302.93	17.305.990.156.00	88.64

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung pada tahun 2019.

Analisis Efisiensi

Analisis efisiensi digunakan terhadap sasaran yang rata-rata capaian kinerjanya 100% atau lebih dibandingkan dengan realisasi penggunaan anggaran. Untuk mengetahui tingkat efisiensi anggaran terhadap capaian Sasaran Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang digunakan pada tahun 2019 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.21
 Efisiensi Anggaran terhadap Capaian Sasaran
 Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung Tahun 2019

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja	Anggaran	
				Realisasi (Rp.)	%
A.	Sasaran 1	1	102,11	8.183.321.135	95,34
1	Melebihi/ melampaui target	1	100 %		
2	Sesuai target	-	-		
3	Tidak mencapai target	-	-		
B.	Sasaran 2	1	100%	3.949.414.215	88.85
1	Melebihi/ melampaui target	-	-		
2	Sesuai target	1	100 %		
3	Tidak mencapai target	-	-		
C.	Sasaran 3	1	100%	5.173.254.806	79.60
1	Melebihi/ melampaui target	-	-		
2	Sesuai target	1	100 %		
3	Tidak mencapai target	-	-		

Dilihat dari table diatas jumlah sasaran 1 yang melampaui target adalah sebanyak 1 buah sedangkan yang mencapai target dan yang tidak mencapai target tidak ada, rata-rata pencapaian sasarnya adalah 102,55% dibandingkan dengan penyerapan anggaran sebesar 88,64% dari anggaran yang tersedia maka dapat dikatakan tingkat efisiensi sasaran 1 adalah sebesar $102,55\% - 88,64\% = 13,91\%$ sehingga pencapaian sasaran 1 cukup efektif dan efisien.

jumlah sasaran 2 yang melampaui target tidak ada dan yang mencapai target sebanyak 1 buah sedangkan yang tidak mencapai target tidak ada, rata-rata pencapaian sasarnya adalah 100% dibandingkan dengan penyerapan anggaran sebesar 88,85% dari anggaran yang tersedia maka dapat dikatakan tingkat efisiensi sasaran 2 adalah sebesar $100\% - 88,85\% = 11,15\%$ sehingga pencapaian sasaran 2 cukup efektif dan efisien.

jumlah sasaran 3 yang melampaui target tidak ada dan yang mencapai target sebanyak 1 buah sedangkan yang tidak mencapai target tidak ada, rata-rata pencapaian sasarnya adalah 100% dibandingkan dengan penyerapan anggaran sebesar 79,60% dari anggaran yang tersedia maka dapat dikatakan tingkat efisiensi sasaran 3 adalah sebesar $100\% - 79,60\% = 20,4\%$ sehingga pencapaian sasaran 3 cukup efektif dan efisien.

Pencapaian Misi pada Tahun 2019 merupakan realisasi pencapaian kinerja tahun Pertama Renstra 2019-2023, dengan demikian diuraikan pula capaian misi berdasarkan realisasi anggaran selama kurun waktu 1 (Satu) tahun sebagai berikut :

Tabel 3.22
 Penyerapan Anggaran pada setiap Misi Kecamatan Astanaanyar
 Kota Bandung Tahun 2019

No.	Misi	Pagu Indikatif Renstra (Rp.)	Realisasi Anggaran tahun ke-					Jumlah	% (dari Pagu Indikatif)
			1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)		
A.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	8.579.853.395	8.183.321.135					8.183.321.135	95,34
B.	Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan di Kecamatan Astanaanyar	4.445.248.464	3.949.414.215					3.949.414.215	88,85
C.	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Astanaanyar	6.498.764.443.68	5.173.254.806.00					5.173.254.806.00	79,60

Secara umum efektifitas dan efisiensi anggaran terhadap capaian Misi Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan **efektif** dan **efisien** terhadap capaian kinerja misi organisasi.

3.5 Prestasi dan Penghargaan

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung dilakukan secara



optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut, sebagai berikut :

1. Prestasi Tingkat Nasional

No.	Prestasi	Juara	Tahun
1			

2. Prestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat

No.	Prestasi	Juara	Tahun
1.			

3. Prestasi Tingkat Kota Bandung dan Lainnya

No.	Prestasi	Juara	Tahun
1.	Pasangan Akseptor KB Lestari Kategori 15 Tahun	Juara 3	2019
2.	Pembinaan Pedagang Non Formal	Terbaik 3	2019
3.	Glow Art Festival	Juara 3	2019

KERAMAT
KREATIF RESPONSIF
AGAMIS
AMANAH TERTIB

BAB IV

PENUTUP



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung Tahun 2019 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung Tahun 20189. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung Tahun 2019 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2019 Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai rata-rata capaian kinerjanya sebesar 102,55%.
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai rata-rata capaian kinerjanya sebesar 100%.
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai rata-rata capaian kinerjanya sebesar 100 %



Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 (Tiga) sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 85 - 100 yang berarti rata-rata capaian kinerjanya melebihi target yang telah diperjanjikan. Dalam Tahun Anggaran 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota

Bandung Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 31.249.454.159.43 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 28.429.663.243.00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 90.98%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2019 Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung kondisi anggaran adalah Surplus Rp. 2.819.790.916.43

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

Bandung, Januari 2020

KECAMATAN ASTANAANYAR



Drs. SYUKUR SABAR

Pembina Tk. I

NIP. 19680904 199006 1 001